

Tahun
2024

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Badan Penelitian Pengembangan dan
Perencanaan



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah



bappedalitbang@polmankab.go.id



Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Mandar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Balitbangren pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tergambar pada pencapaian Kinerja Balitbangren.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Balitbangren memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan. Uraian tingkat ketrecapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Satuan		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Nilai	Tahun 2024		
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif (30.00)	Inovatif (45.32)	151.06
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Indeks	Sangat Baik (88.31)	Baik	99,53
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (80)	A (85.12)	106.25
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis(Renstra) tahun 2019-2024. LAKIP Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIP Balitbangren dibuat sebagai bentuk komitmen guna terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Polewali Mandar, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Rencana kinerja Tahun 2024 ini ditetapkan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, LAKIP ini disajikan dalam 4 (empat) Bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Perencanaan Kinerja, Bab Akuntabilitas Kinerja dan Bab Penutup.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Balitbangren pada tahun 2024.

Polewali, 15 Februari 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	01
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	05

BAB II : PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS	11
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024	15

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA	18
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	58

BAB IV : PENUTUP

PENUTUP	61
---------	----

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024	65
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	66
POHON KINERJA TAHUN 2024	92
PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	99
MONITORING DAN EVALUASI RENJA TAHUN 2024	102
LAPORAN EVALUASI INTERNAL TAHUN 2024	101

Daftar Gambar & Grafik

1. Gambaran Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan	07
2. Gambar Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	25
3. Grafik Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024	26
4. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 1)	31
5. Grafik Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024	37
6. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2)	39
7. Grafik Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024	44
8. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (indikator 3)	47
9. Grafik Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024	49
10. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4)	51
11. Grafik Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024	54
12. Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5)	56

Daftar Tabel

1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019–2024 ..	14
2. Tabel Program dan Alokasi anggaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024	17
3. Tabel Realisasi Indikator Utama (IKU) 2024	21
4. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	22
5. Tabel Jenis dokumen perencanaan yang disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024	25
6. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (indikator 1)	27
7. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 1)	29
8. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2).....	38
9. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)	38
10. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)	39
11. Tabel Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan dirinci per unsur layanan	43
12. Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	44
13. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3)	45
14. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3)	46
15. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4)	50
16. Tabel Program, kegiatan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4)	51
17. Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5)	56
18. Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5)	55
19. Tabel Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2024	59
20. Tabel Realisasi Anggaran 2024.....	60



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Badan Penelitian Pengembangan
dan Perencanaan

BAB I

ishak_sirarnapoi

PENDAHULUAN

L A K I P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024



A. LATAR BELAKANG



BAB I
Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Badan Penelitian pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi daerah. Akuntabilitas salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi Pemerintah ditingkat pusat dan daerah dari entesitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Balitbangren sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Polewali Mandar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban Balitbangren untuk memper tanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

LAKIP ini merupakan per tanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan memper timbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).



I.DASAR HUKUM

Dokumen LAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024;
- Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;
- Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2024 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.



2. MAKSUD DAN TUJUAN

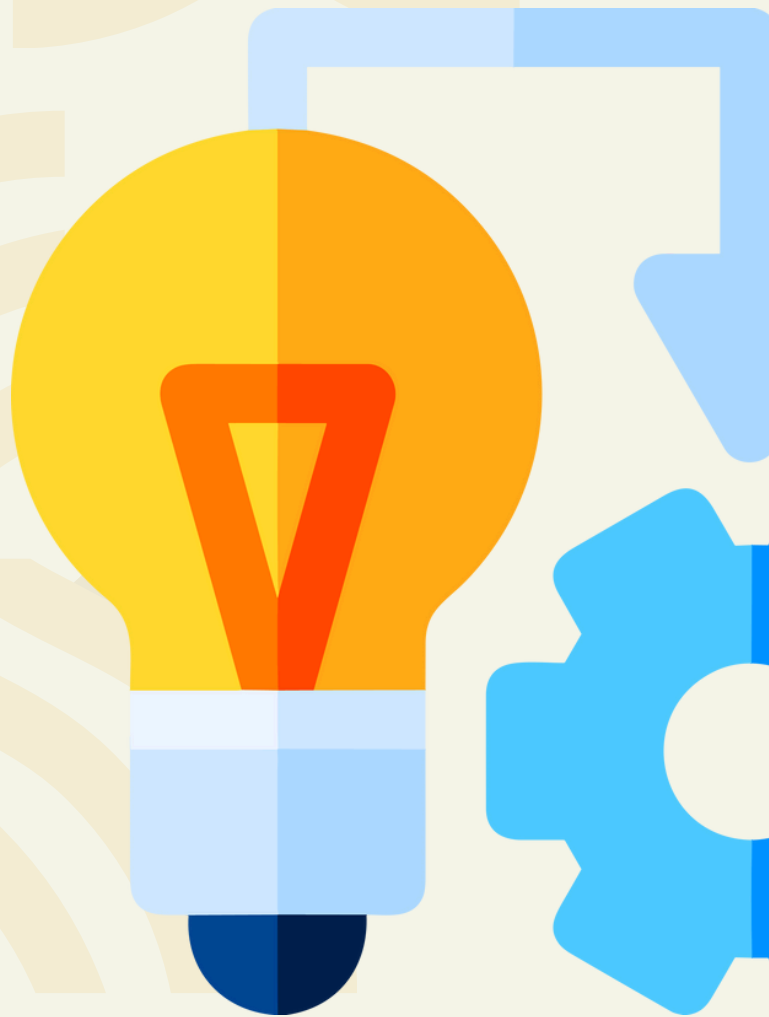
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 adalah:

2.1 Maksud Laporan

- Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Sebagai parameter penilaian kinerja Perangkat Daerah; Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya;
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;
- Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah pada periode kerja selanjutnya;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya;
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

2.2 Tujuan Laporan

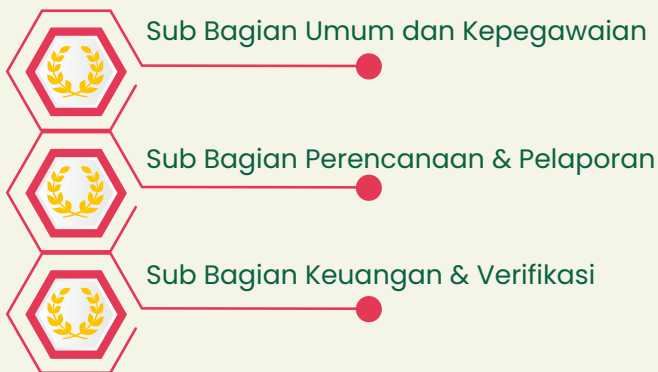
- Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Balitbangren kepada Bupati;
- Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Balitbangren;
- Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Balitbangren.



B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK & FUNGSI PERANGKAT DAERAH

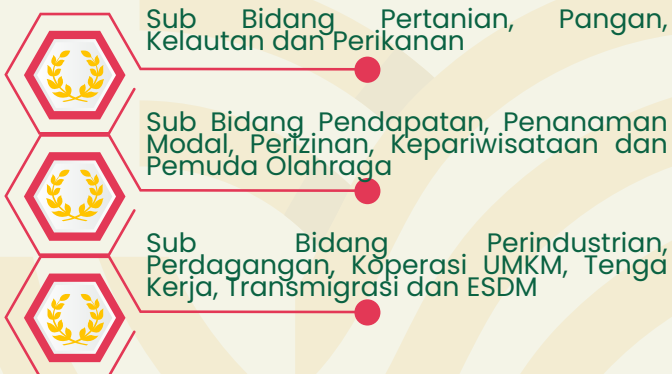
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

SEKRETARIAT



KEPALA BADAN

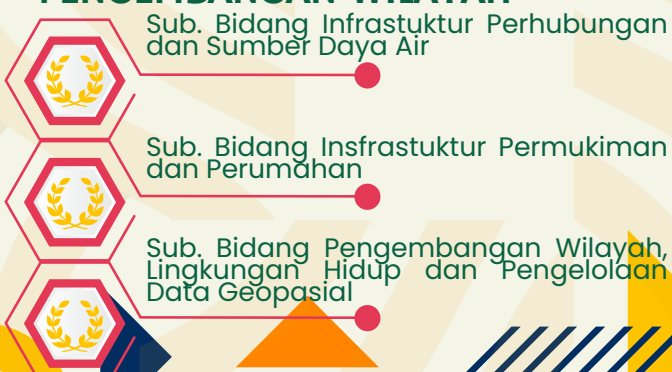
BID EKONOMI



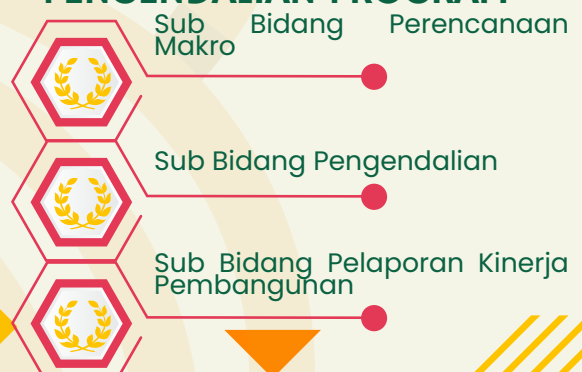
BID SOSIAL & BUDAYA



BID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH



BID PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM



I.TUGAS POKOK & FUNGSI

Berdasarkan peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, kedudukan Balitbangren adalah unsur penunjang tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang penelitian pengembangan dan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangren sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan



Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

Serta berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan dibentuk UPTD Agro Techno Park sebagai fungsi penunjang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.

GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI



2. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Balitbangren yang membantu Kepala Daerah dalam fungsi Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan masih menghadapi

beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Perubahan Regulasi/Peraturan Perundangan

Sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 beberapa regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit baik diawal, pertengahan maupun akhir tahun rencana (Implementasi aplikasi SIPD Kemendagri). Beberapa diantaranya: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- Belum maksimalnya penyebaran sistem pengelolaan knowledge

Belum maksimalnya penyebaran sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Balitbangren secara terintegrasi. Produk Balitbangren yang tersedia di website Balitbangren dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik.

- Belum maksimalnya penyebaran sistem pengelolaan knowledge

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan belum melakukan kajian mendalam Penyebabnya adalah masih kurangnya sumber daya manusiayang memiliki disiplin ilmu terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

- Belum maksimalnya pengawasan perencanaan sampai ke tahap penganggaran

Rencana kerja perangkat daerah yang telah disusun pada tahapan perencanaan tidak berjalan konsisten sampai pada tahap penagnggaran diakibatkan oleh banyaknya kebijakan dan

pembahasan dengan pihak legislatif serta pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD yang belum maksimal dalam pengelolaannya. Sehingga pada tahap penganggaran banyak yang tidak sesuai dengan rencana

3. Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 yang merupakan bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, disusun berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

4. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.472.427.548,07,- Jumlah Belanja Operasi Rp. 5.462.555.208,07,- dan Belanja Modal Rp. 9.872.340,-

5. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 ini terdiri dari empat (4) bab sebagai berikut:





Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Badan Penelitian Pengembangan
dan Perencanaan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

L A K I P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen Renstra memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

BAB II PERJANJIAN KINERJA



Dokumen perencanaan strategis tingkat SKPD berupa dokumen Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan tingkat kabupaten berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024
Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah :

VISI

POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA



TUJUAN

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern

SASARAN



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dari Visi dan 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar adalah pada misi 4 yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern”**.

I. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Mengacu kepada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern”**

2. SASARAN

Belum maksimalnya penyebarluasan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Adapun sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : specific (jelas), measureable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator dilevel impact (dampak). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Disamping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama).

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Akuntabel dan Modern		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62	66	71	75	81	86
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Persen	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A	A	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

A.I Penetapan Indikator Kinerja Utama

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar serta RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024. adapun Indikator Kinerja Utama Balitbangren ditetapkan sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama Balitbangren Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Satuan		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Nilai	Tahun 2024		
1	Meningkatnyakerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif (30.00)	Inovatif (45.32))	151.06
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Indeks	Sangat Baik (88.31)	Baik	99,53
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (80)	A (85.12)	106.25
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Penetapan kinerja tersebut merupakan tekad dan janji antara Pimpinan Instansi unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah terhadap atasan langsungnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup out come yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya demi terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahun.

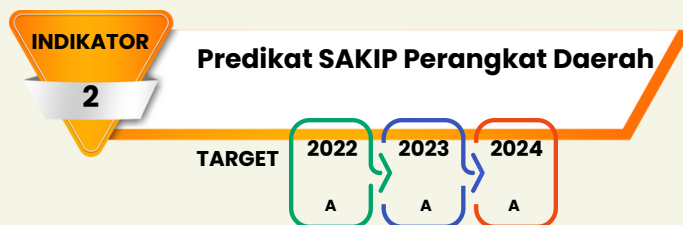
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai



Penetapan kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran, 5 (lima) Indikator, dengan rincian sebagai berikut:



Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.5.472.427.548,07 anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

**Tabel Program dan Alokasi anggaran
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024**

SASARAN	PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE
Menigkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 335.797.221,10	6,13
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 554.752.434	10,14
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.069.999.675,97	19,55
Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp. 3.511.878.216	64,18
Jumlah		Rp. 5.472.427.548,07	



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Badan Penelitian Pengembangan
dan Perencanaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

L A K I P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal ini sesuai dengan amanah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi :

- Pencapaian sasaran organisasi;
- Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan
- Perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program /kegiatan/ sub kegiatan, dan persentase realisasi anggaran perprogram/ kegiatan/ subkegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja mencakup 4 (empat) unsur utama, yaitu :

- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai
- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir.
- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

A.I Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan atau kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja > 95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil
2. Capaian kinerja > 80% sampai dengan 95% = Berhasil
3. Capaian kinerja > 50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil
4. Capaian kinerja < 50% = Kurang Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perencanaan dan Penelitian secara umum realiasi atas target yang telah ditetapkan adalah 109.29%. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini.

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efesiensi dan efektivitas.

Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja. Untuk setiap sasaran yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Realisasi Indikator Utama (IKU) 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi	Tingkat Capaian
				Sasaran	Satuan		
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Persentase dokumen pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dibagi dengan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan dikali 100	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah divalidasi oleh Badan Litbang Kemendagri melalui proses penjaminan mutu dan UKKPPM	Indeks	Inovatif (30,00)	Inovatif (45,32)	151,06
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah indeks kepuasan stakeholder atas survei kepuasan pelayanan publik yang dilakukan perangkat daerah secara berkala dibagi dengan jumlah jenis pelayanan perangkat daerah yang dilakukan survei	Indeks	Sangat baik (88,31)	Baik	99,53
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Review Inspektorat atau implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah	Predikat	A (80)	A (85,12)	106,25
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan set	Persen	100	100	100

A.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 Terhadap target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra 2019-2024 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Dari tabel dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja tercapai setiap tahunnya, Tahun 2022, 2023, 2024 dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	66,67	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif (35,91)	Inovatif (43,67)	Inovatif (41,64)	Inovatif (45,32)
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Indeks	Baik (87,96)	Baik (86,33)	Baik (86,84)	Baik (87,96)
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (83,64)	A (86,59)	A (85,12)	A (85,12)
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100	100

A.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada analisis capaian kinerja membahas pencapaian formulasi dan cara perhitungan dalam memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A.3.1 Sasaran Strategis I (Satu)

**MENINGKATNYA
KINERJA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**

INDIKATOR

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan yaitu : RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dimana ketiga dokumen perencanaan pembangunan tersebut saling berkaitan, dalam menyusun RPJMD pemerintah daerah mengacu pada RPJPD, sedangkan untuk penyusunan RKPD (dokumen perencanaan 1 tahunan) mengacu pada dokumen RPJMD. Setiap penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa tahapan perencanaan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yang meliputi rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Tahapan tersebut meliputi :

- Penyusunan Rancangan awal
- Perumusan Rancangan
- Pelaksanaan Musrenbang
- Perumusan Rancangan Akhir
- Penetapan Rencana

Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan daerah ditandai dengan terlaksananya setiap tahapan-tahapan perencanaan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka :

- Menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku
- Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan
- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian melalui pencapaian indikator kinerja.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

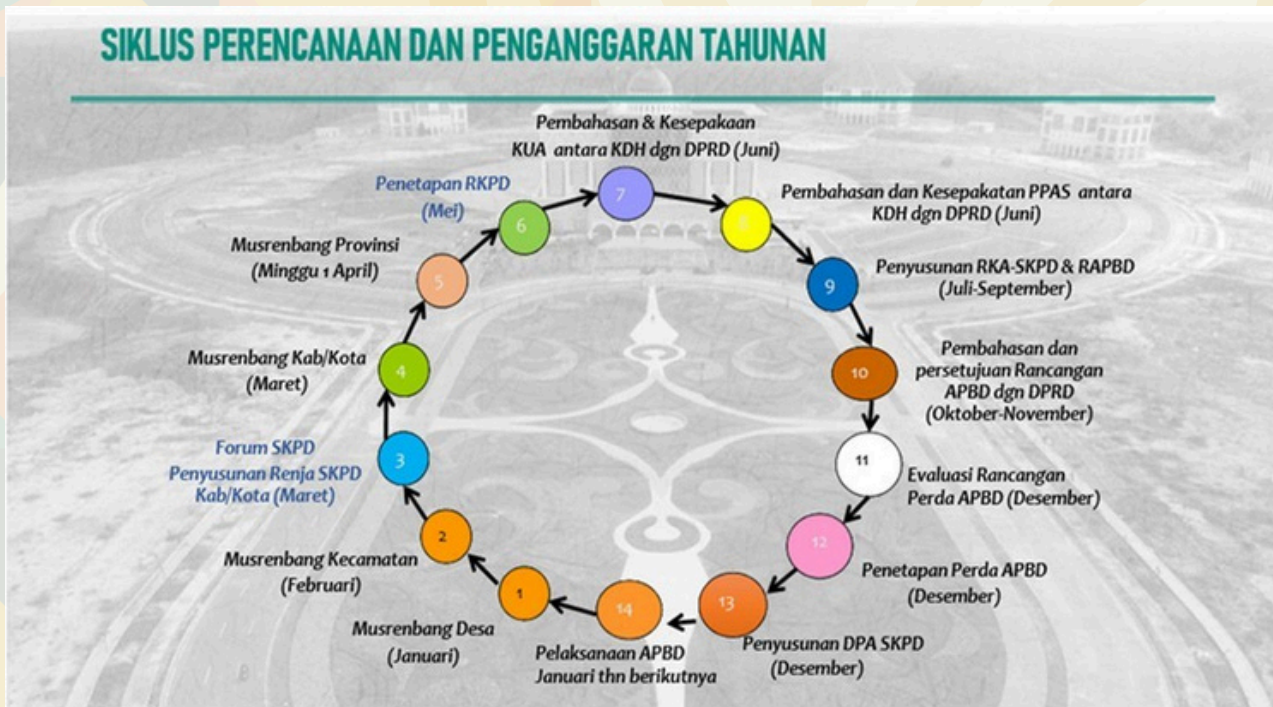
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang (dokumen RPJPD), dokumen perencanaan jangka menengah (dokumen RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan (dokumen RKPD) sesuai standar yang meliputi kaidah-kaidah penyusunan dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan IKU Tahun 2019-2024 indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar ketentuan penyusunan dan tepat waktu dengan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan.

Beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 yaitu :

1. Dokumen RKPD Tahun 2025 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya
2. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya.

Gambar Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024



Jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jenis dokumen perencanaan yang disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2024

No	Nama Dokumen	Regulasi	Tanggal Pengesahan
1	RKPD Tahun 2025	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024	5 Juli 2024
2	RKPD Perubahan Tahun 2024	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024	13 Agustus 2024

Dari kedua dokumen perencanaan tersebut seluruhnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan dan telah sesuai dengan tahapan Sehingga persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan}} \times 100$$

$$= \frac{2}{2} \times 100$$

$$= 100$$

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah** dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Target 2024
100%

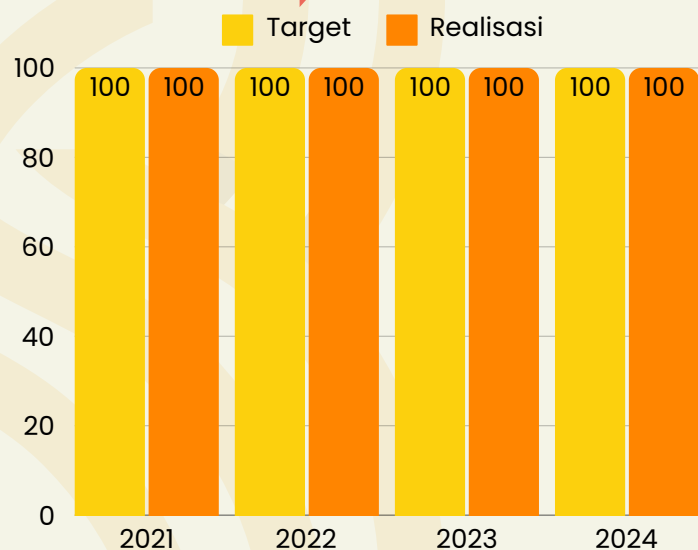
Realisasi 2024
100%

Capaian 2024
100%

Kategori
Sangat
Berhasil

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Perbandingan capaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dalam kurun waktu 4 (tahun) terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024

Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya tahun 2024 mengalami setara dengan kategori sangat berhasil.

Perbandingan capaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (indikator I)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra (%) 2024	Capaian % 2024 terhadap target 2024
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Penunjang

- ✚ Adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengawal seluruh tahapan perencanaan sehingga dokumen tersusun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- ✚ Adanya regulasi terkait tahapan/jadwal perencanaan sampai penganggaran sehingga setiap aktivitas jelas dan terukur
- ✚ Adanya kepatuhan dan komitmen serta ketertiban seluruh Perangkat Daerah, stakeholder dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan
- ✚ Tersedianya dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

Faktor Penghambat

- ✚ Terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 27 Desember 2021 yang mewajibkan pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam bentuk verifikasi, validasi dan inventarisasi pada aplikasi SIPD
- ✚ Padatnya jadwal tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) di Tahun 2024 menyebabkan kurang maksimalnya peran dan fungsi Balitbangren

Solusi

- ✚ Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pusadatin Kemendagri dan Badan Keuangan terkait regulasi kependagri yang terbit di tahapan penganggaran
- ✚ Menyusun jadwal dan tahapan proses perencanaan secara terstruktur untuk meminimalisir padatnya agenda kegiatan serta melakukan pembagian peran secara maksimal

Dalam hal kesesuaian dengan aturan yang berlaku, penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada beberapa regulasi diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu pada tahun 2024 yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 4 kegiatan, 10 sub kegiatan
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 kegiatan, 18 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikutini :

Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator I)

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<i>Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD</i>	100 %	100%	100
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan</i>	3 Laporan	3 Laporan	100
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Laporan	1 Laporan	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 laporan	1 laporan	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	1 laporan	1 laporan	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Laporan	2 Laporan	100
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1 laporan	1 laporan	100
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan</i>	1 laporan	1 laporan	100
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah laporan hasil implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	1 laporan	1 laporan	100
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	1 laporan	1 laporan	100

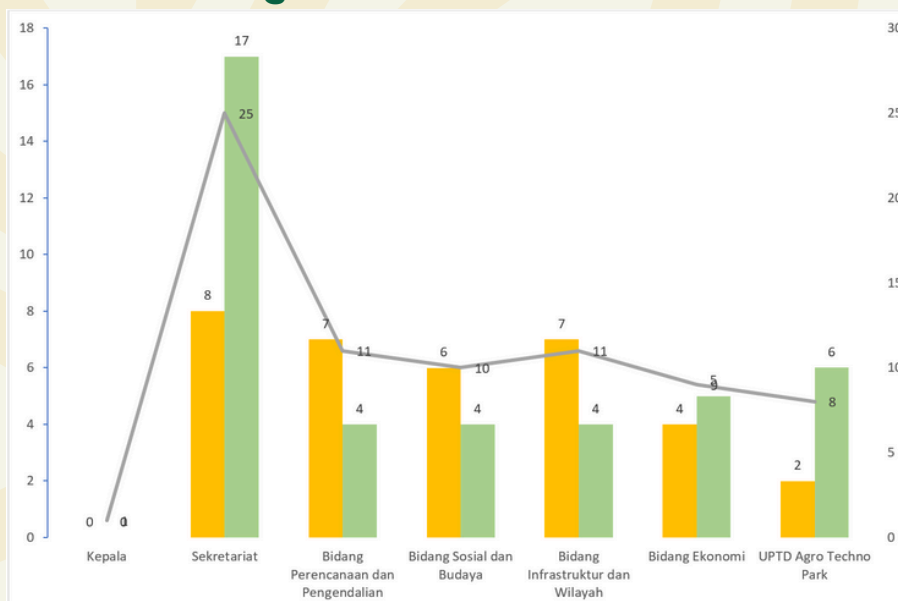
Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program OPD Pada Bidang Sosial Budaya Antara RPJMD Dengan RENSTRA Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Laporan Kesesuaian Renstra/Renja Perangkat Daerah Dengan RPJMD/RKPD Bidang Sosial Budaya	6 Laporan	6 Laporan	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	1 laporan	1 laporan	100
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	1 laporan	1 laporan	100
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Kesesuaian Renstra/Renja Perangkat Daerah Dengan RPJMD/RKPD Bidang Ekonomi	6 Laporan	6 Laporan	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	1 laporan	1 laporan	100
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	1 laporan	1 laporan	100
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Kesesuaian Renstra/Renja Perangkat Daerah Dengan RPJMD/RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	1 laporan	1 laporan	100
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	1 laporan	1 laporan	100
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	100
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	100

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada grafik dibawah:

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator I)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Sekretariat yang jumlah 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani 8 (delapan) pegawai ditambah 17 Tenaga kontrak. Bidang Perencanaan dan Pengendalian program yang jumlahnya 11 (sebelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Bidang Sosial Budaya yang jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (enam) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. Bidang Ekonomi yang jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (enam) pegawai ditambah 11 (sebelas) tenaga kontrak. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang jumlahnya sebanyak 11 (sebelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (lima) tenaga kontrak. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah sesuai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 335.797.221,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 306.695.555-atau 91,33 %. dan Rp. 890.549.655,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 756.200.012 atau 84,91 %.

Foto Forum Perangkat Daerah 2024



Foto Musrenbang Kecamatan 2024



Foto Musrenbang Kabupaten 2024



Foto Rapat Monev Pembangunan TW 2024



A.3.2 Sasaran Strategis 2 (Dua)

**MENINGKATNYA
KUALITAS
INOVASI
DAERAH**

INDIKATOR

Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Dalam penilaian tersebut proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah melalui seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan /atau insentif inovasi daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah

Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui :

- Peningkatan pelayanan publik Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- Peningkatan daya saing daerah

Bentuk inovasi daerah berupa :

- Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Inovasi pelayanan publik Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Kriteria inovasi daerah :

- Mengandung pembaharuan seluruh atau sebahagian unsur dari inovasi
- Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat
- Tidak mengakibatkan pembebanan dan /atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan
- Dapat direplikasi

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Badan Penelitian Pengembangan dan perencanaan (Balitbangren) ditunjuk sebagai pembina inovasi daerah untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar karena tugas pokok dan fungsinya selain mengurus urusan perencanaan juga mengurus urusan penelitian. Urusan penelitian dan pengembangan ini juga termasuk urusan fungsi penunjang. Balitbangren selaku Pembina inovasi daerah memiliki tugas untuk menghimpun seluruh bentuk- bentuk inovasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar melalui seluruh perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong penerapan good governance dalam tata kelola Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya kemudian tujuan akhir menjadikan Kabupaten terinovatif dalam ajang IGA (Innovative Government Award).

Perjalanan IGA Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini merupakan tahun keempat dilakukan karena perjalanan IGA sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 masih di level belum dapat dinilai karena Balitbangren tidak melakukan penginputan inovasi daerah di tahun tersebut akibat tidak adanya informasi terkait indeks inovasi daerah. Namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ini kabupaten Polewali Mandar melalui Balitbangren

sudah memulai penginputan indeks inovasi. Tahun 2024 Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan kategori inovatif dengan skor indeks 45,32 dengan ranking 212 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024.

Meningkatnya kualitas inovasi daerah ditandai dengan pencapaian inovasi daerah melalui penilain indeks inovasi berdasarkan indikator indeks inovasi, persyaratan pengisian indeks inovasi, dan variable penilaian indikator lainnya. Data inovasi daerah yang dimasukkan oleh perangkat daerah yaitu :

- GERTAK EKSTREM 2024 (Gerakan Tanpa Kemiskinan Ekstrem 2024)
- SI PETANI TAMPAN (Sistem Pertanian Terpadu, Terintegrasi, Mandiri, Partisipatif dan Modern)
- UGD STUNTING (Updating Geospasial Data Stunting)
- DESAK PBB (Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi Bangunan)
- ASPRI DANA ONLINE (Aplikasi Surat Perintah Pencarian Dana Online)
- SIMPEG INTEGRASI (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
- SIMKP INTEGRASI (Sistem Informasi Kinerja Pegawai)
- SI POLOS (Sistem Informasi Prosedur Pelayanan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan)

- Pasar Online Pekkabata
- SIAAPma' (Sistem Informasi Aplikasi Permukiman)
- AFF (Aplikasi Fermentasi Fermifan) di Tambak
- Pasar Kerja Online Polewali Mandar
- LTSA PP PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia) Kab. Polewali Mandar
- RUANG KOPASSUS IMB (Ruang Konsultasi dan Pengaduan Teknis Khusus IMB)
- Digitalisasi Berbasis Video Infografis
- Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan
- Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Organisasi Perangkat Daerah
- DUM DUUM (Darah Untuk Kemanusiaan Darah Untuk Ibu Melahirkan)
- Sipamandaq Kawal Ibu Hamil
- POSTER JAGO (Posyandu Terintegrasi Menuju Generasi Berdaya Saing Global)
- JAGO TARI (Jumat Ingat Obat Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri)
- SCMU (Social Care Mobile Unit)
- SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)
- PULSA DATA GOOGLE DRIVE (Kumpul dan Simpan Data Secara Digital dengan Aplikasi Google Drive)
- THE KING (KIR Online Jago) Pengujian Kendaraan berbasis BLUE (Bukti Lulus Ujian Elektronik) didukung Aplikasi Digital Secara Online
- Pemupukan Spesifik dengan Menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering
- MPKH (Model Pengembangan Kawasan Hortikultura)
- ATP (Alat Tabur Pupuk)
- PELSA (Pelapor Desa) Keswan
- Teknologi Tepat Guna
- Aplikasi Web Polman Satu Data
- MOGE (Mobile Masagena)
- MASIGA MPP AIM (Mudah, Transparansi, dan Gampang Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena)
- Smart School
- MEPAGURU (Membangun Kapasitas Guru Penggerak) Berbasis Aplikasi Android
- Aplikasi Pelaporan Berkala Pelaksanaan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
- IBAS (Inovasi Bank Sampah) Sipamandaq
- SIMPEDA (Sistem Percepatan Dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian)
- AGEN KOBAK DUKCAPIL POLMAN (Aksi Gerakan Dokumen Kependudukan Bagi Korban Bencana Dinas Kependudukan Catatan Sipil Polewali Mandar)
- PELANDUK JAGO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Go Digital)

- GASPOL CINTA PM (Gerakan Aparatur Satpol PP Cinta Polewali Mandar)
- MATINGMA P6 GAKUM BAKAR (Pusat Pelayanan Pengaduan Perda, Perkada Gangguan Ketertiban dan Bencana Kebakaran)
- Teras POP (Teras Pemuda Olahraga & Pariwisata)
- WISATA KOTA SI JAGO (Kolaborasi antara Seni Jajanan & Olahraga Polman)
- KIS Pemuda (Kelas Inspiratif Pemuda)
- SIMONTOKDESI (Sistem Informasi Manajemen Operasional Terpadu Organisasi Pemuda dan Pemuda Potensi)
- Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android
- D'BALATAU (Digitalisasi Kebencanaan dan Layanan Tanggapan Darurat)
- KLIK APIP (Klinik Layanan Konsultasi APIP)
- Smart Hospital
- METRO CUTY (Medical Tourism to Community Satification)
- BERKAH (Bersama Kita Atasi Limbah)
- Taman Harmonis
- Berdaya dengan e-sakip (e-sakip v.3)

Untuk kategori penilaian IGA, penilaian indeks inovasi terdiri dari beberapa kategori/level, diantaranya :

1. Kategori sangat inovati : 60.00 – 100.00
2. Kategori inovatif : 30.00 – 59.99
3. Kategori kurang inovatif : 00.01 – 29.99
4. Kategori tidak dapat dinilai : 00.00

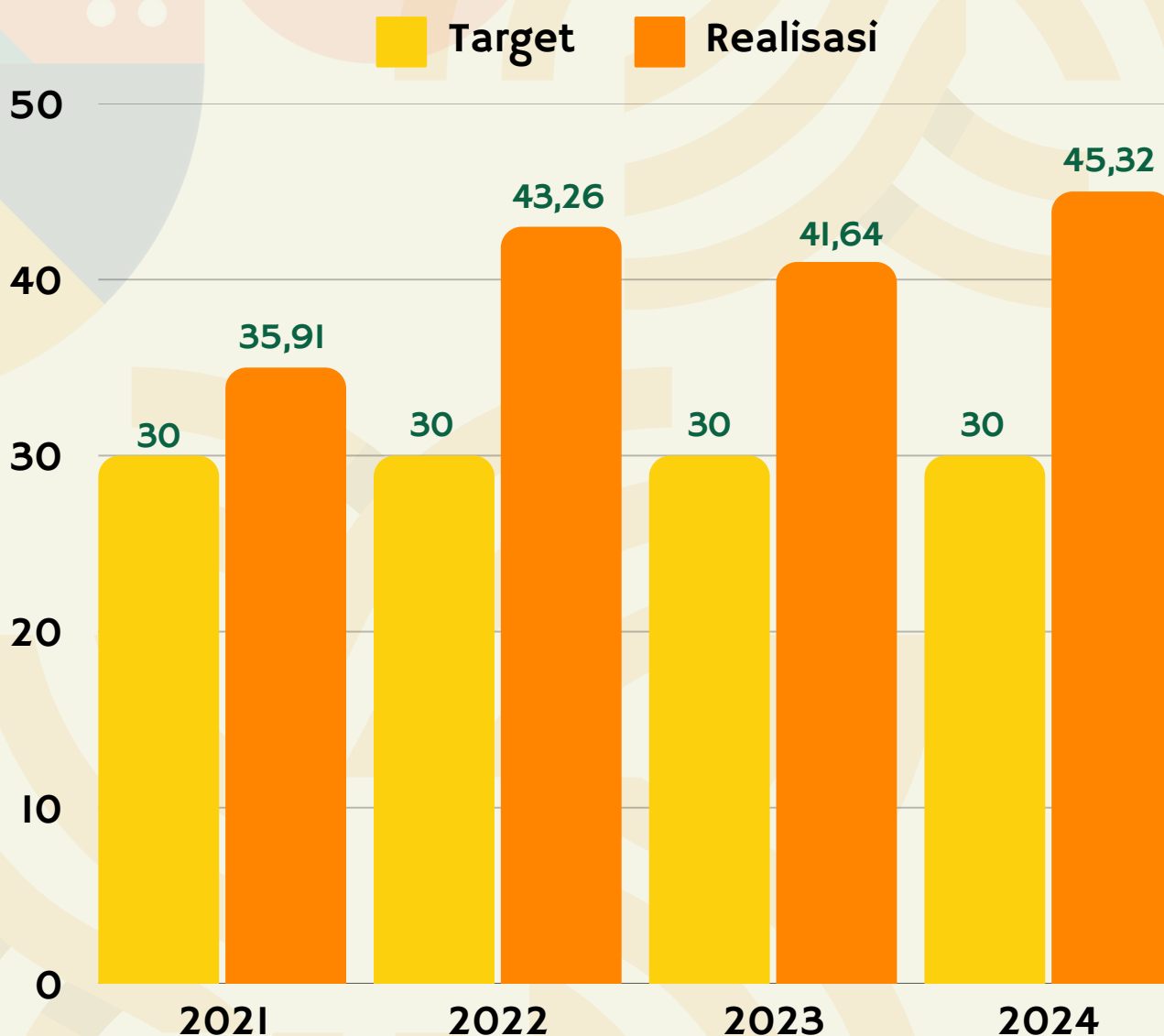


Hasil evaluasi sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah, mendapatkan angka tingkat capaian realisasi sebesar 151,06% dengan predikat Sangat Berhasil.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian indkes inovasi daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 151,06% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi ini mengalami perbaikan indeks dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023.

Perbandingan capaian indeks inovasi daerahserta dibandingkan dengan target akhir tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra (%) 2024	Capaian % 2024 terhadap target 2024
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	Inovatif (30,00)	Inovatif (45,32)	151,06	Sangat Inovatif (60,00)	75,53

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Tahun 2024 mencapai nilai sebesar 75,53% dengan kategori berhasil. Nilai capaian tersebut sudah hampir mendekati target akhir Tahun 2024 dengan nilai indeks 60.00 kategori sangat inovatif.

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator indeks inovasi daerah perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Pendukung

- ❖ Adanya dukungan dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengusulan hasil-hasil inovasi yang ada di perangkat daerahnya
- ❖ Beberapa hasil proyek perubahan oleh Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklatpim menghasilkan karya inovasi yang dapat diikuti dalam penghargaan IGA

Faktor Penghambat

- ❖ Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan disebabkan oleh tidak adanya bidang khusus yang menangani fungsi penelitian dan kelitbangan yang ada di Balitbangren
- ❖ Masih minimnya pengembangan SDM penelitian dan pengembangan
- ❖ Belum optimalnya pemahaman terkait indeks inovasi karena masih kurangnya sosialisasi terkait indeks inovasi daerah dan pelaksanaan IGA

Solusi

- ❖ Mewajibkan setiap Perangkat Daerah, kecamatan ataupun desa menghasilkan karya inovasi untuk diikuti dalam Innovative Government Award (IGA)
- ❖ Perlu adanya aplikasi e-Litbang untuk mengumpulkan semua data-data hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar
- ❖ Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan sosialisasi terkait indeks inovasi daerah

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks inovasi pada tahun 2024 yaitu program Penelitian dan Pengembangan dengan 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

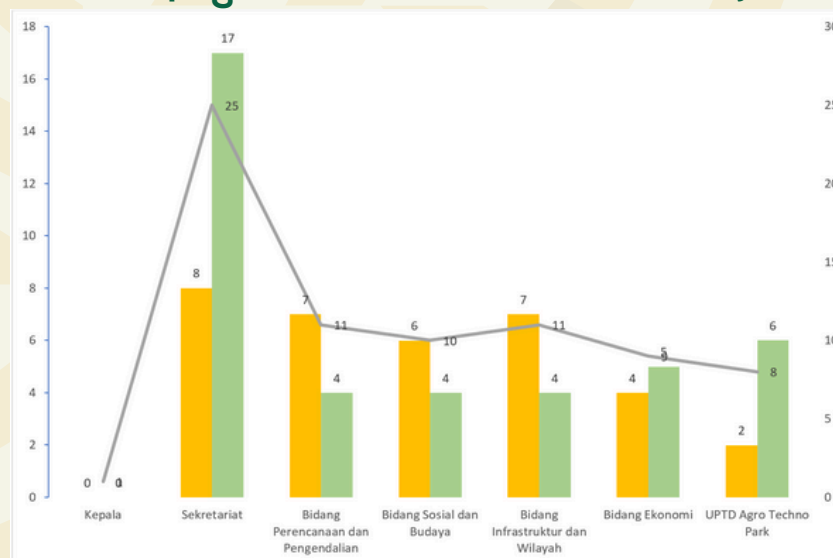
Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>	100%	100%	100
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan Yang Dimanfaatkan	1 laporan	1 laporan	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	2 laporan	2 laporan	100
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitiandan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	1 laporan	1 laporan	100
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi danPembangunan	1 laporan	1 laporan	100
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	1 laporan	1 laporan	100

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah diperoleh dengan efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada grafik dibawah :

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Penelitian dan Pengembangan tersebar di beberapa Bidang diantaranya Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi serta UPTD Agro Techno Park. Bidang Sosial Budaya yang jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. Bidang Ekonomi yang jumlahnya sebanyak 9 (sembilan) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 4 (empat) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang jumlahnya sebanyak 11 (sebelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai

ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. UPTD Agro Techno Park yang jumlahnya 8 (delapan) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 2 (dua) pegawai ditambah 6 (enam) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja /perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator indeks inovasi daerah sebesar Rp. 1.069.999.675,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 896.123.987,- atau 83,74 %.

A.3.3 Sasaran Strategis 3 (Tiga)

**MENINGKATNYA
KUALITAS TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
PERANGKAT
DAERAH**

INDIKATOR

1

**Indeks kepuasan Pengguna
Pelayanan publik perangkat
daerah**

Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara internal maupun secara eksternal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses

pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholder untuk mewujudkannya. Keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/good governance adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, keterbukaan /transparansi, ketaatan pada aturan hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan indikator:

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kewenangan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah bertanggungjawab

baik kepada masyarakat yang berkepentingan.

3. Penegak Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsif, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks inovasi pada tahun 2024 yaitu program Penelitian dan Pengembangan dengan 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

1. Layanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
2. Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3. Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya
4. Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi
5. Layanan Informasi Geospasial

6.Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian

7.Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sistem Informasi Geografis (SIG)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu indeks kepuasan masyarakat/pengguna layanan (IKM). Metode pengukuran IKM berpedoman pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah yaitu Balitbangren Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut berikut ini :

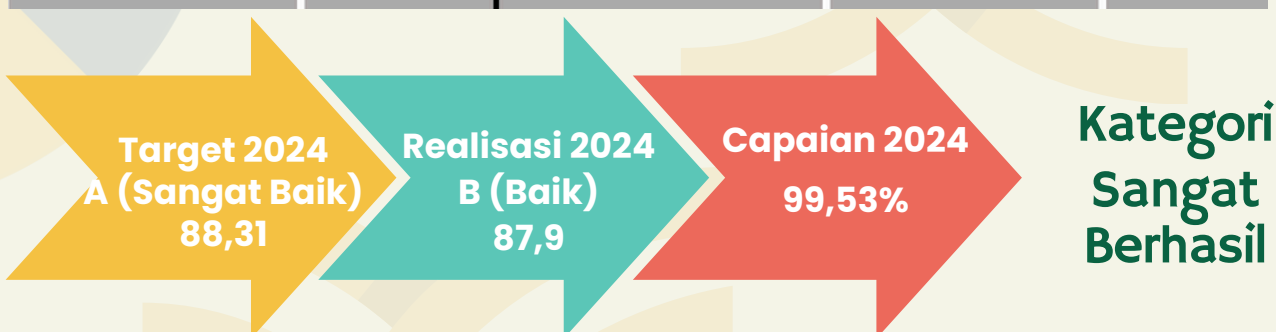
Tabel Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan dirinci per unsur layanan

No.	Jenis Layanan	Unsur Pelayanan									Nuilai IKM
		Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif	produk Layanan	Kompetenansi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Sarana dan Prasarana	
1.	Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek sosial	3.074	3.370	3.296	3.778	3.222	3.296	3.556	3.444	3.778	85.5
2.	Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3.273	3.364	3.273	3.636	3.273	3.182	3.364	3.455	3.636	84.5
3.	Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya	3.375	3.313	3.296	3.625	3.188	3.188	3.313	3.250	3.688	83.8
4.	Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi	3.429	3.429	3.286	3.786	3.500	3.571	3.643	3.500	3.571	88.03
5.	Layanan Informasi Geospasial	3.167	3.667	3.333	3.833	3.333	3.500	3.833	3.500	3.500	87.9
6.	Layanan Pendampingan penakaran benih padi dan palawijavarietas BATAN	3.261	3.348	3.217	3.043	3.304	3.261	3.348	3.304	3.870	83.18
7.	Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian	3.500	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	88.9
8.	Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Geografis (SIG)	3.750	3.750	3.500	3.500	3.500	3.750	3.750	3.250	3.250	88.83
		3.354	3.468	3.318	3.332	3.353	3.406	3.538	3.400	3.599	87.9
Jumlah Rata-rata											87.9

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah (Balitbangren) berada pada nilai 87,9 atau kategori B (baik) sesuai dengan tabel berikut :

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

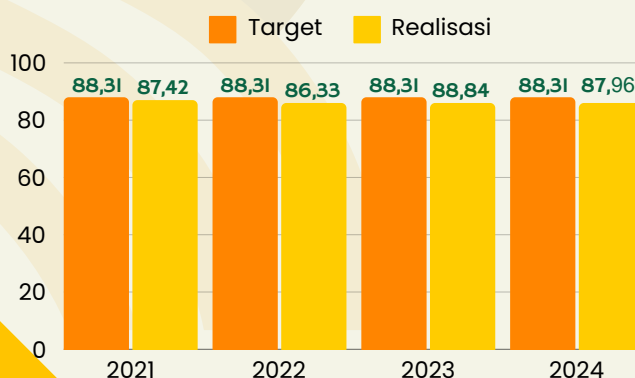
Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Layanan	Nilai Konversi	Nilai Interval SKM	Nilai Persepsi
Tidak Baik	D	25-64,99	1,00-2,5996	1
Kurang Baik	C	65,00-76,60	2,60-3,064	2
Baik	B	76,61-88,30	3.0644-3,532	3
Sangat Baik	A	88,31-100	3,5324-4,00	4



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan atas 8 jenis layanan Balitbangren Tahun 2024 mencapai indeks 87.96 atau predikat kinerja layanan Baik. Capaian ini belum mencapai target predikat Sangat Baik dengan nilai 88.31 dimana hasil penilaian IKM hanya sebesar 87.96 namun dari segi capaian tergolong kategori Sangat Berhasil dengan nilai 99,53%.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJATAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks inovasi pada tahun 2024 yaitu program Penelitian dan Pengembangan dengan 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :



Grafik Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024

Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 99,53% dengan kategori sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2023 kondisi ini menurun dibandingkan capaian tahun 2024.

Perbandingan capaian kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikutini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra (%) 2024	Capaian % 2024 terhadap target 2024
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	88.31	87.96	99.53%	88.31	99.53

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 99,53% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut mendekati target akhir Renstra.

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Pendukung

- ❖ Adanya aplikasi Survei Pelayanan Publik pada website.polmankan.go.id
- ❖ Tingginya motivasi kerja pegawai

Faktor Penghambat

- ❖ Belum optimalnya informasi kepada pengguna layanan aplikasi Survei Pelayanan Publik dalam pengisian kuesioner online
- ❖ Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan

Solusi

- ❖ Diperlukannya monitoring untuk setiap proses yang dilakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang perlu dilakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- ❖ Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana kerja
- ❖ Melakukan sosialisasi baik secara lisan melalui petugas pelayanan maupun sosialisai secara online (medsos dsb) terkait survei pelayanan publik secara online melalui aplikasi

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah pada tahun 2024 yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan 7 kegiatan, 24 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

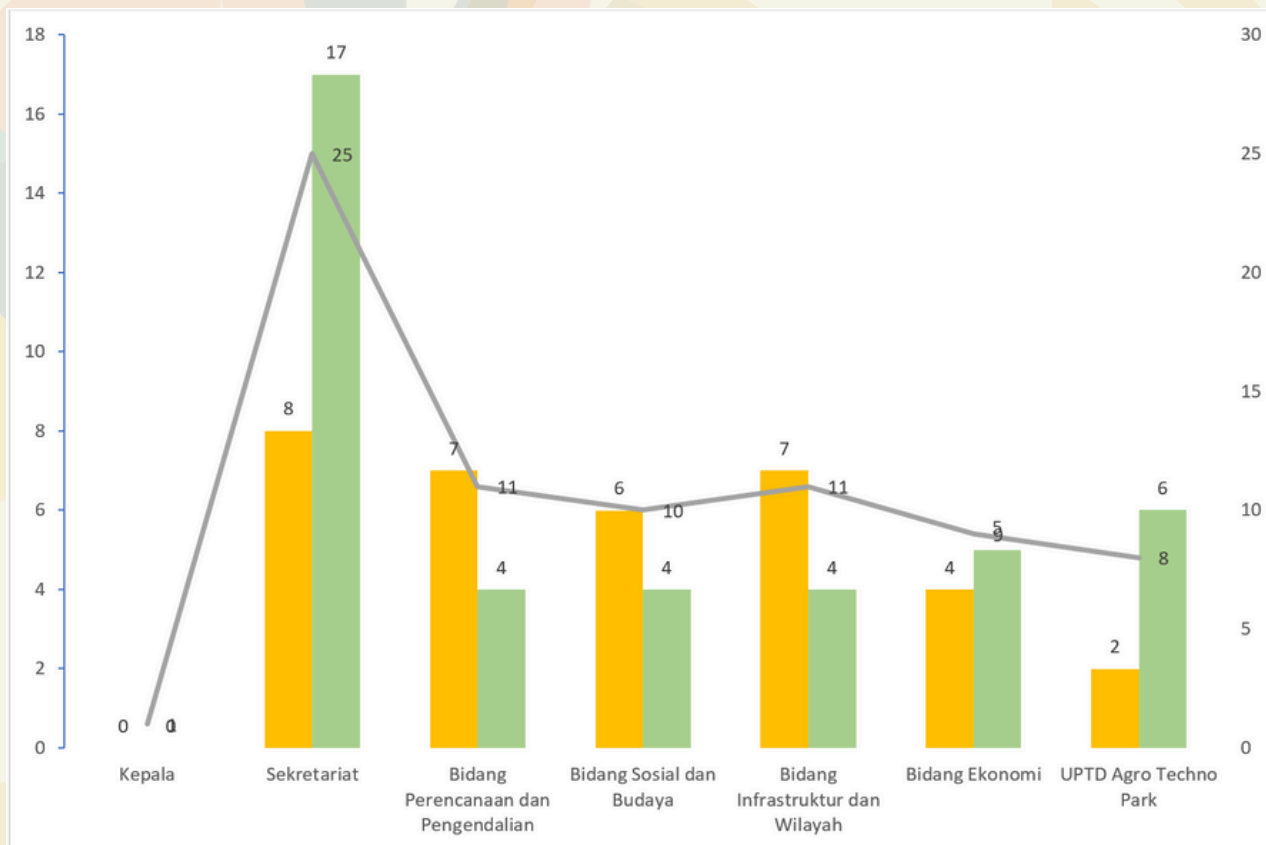
Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3)

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standardan tepat waktu	100%	100%	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	100%	100%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Jenis	24 Jenis	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378 Laporan	378 Laporan	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pengelolaan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola	1.060 surat	1.060 surat	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2.625 M	2.625 M	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	100%	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah diperoleh dengan efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (indikator 3)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja bagian umum dan kepegawaian sekretariat Balitbangren yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (sepuluh) pegawai ditambah 17 (tujuh belas) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah sebesar Rp. 961.227.953,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 905.036.661,- atau 94.15%

A.PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana Instansi ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan. Berdasarkan surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor 047.7/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tingkat Akuntabilitas kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapatkan nilai 85.12 dengan predikat A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Komponen yang menjadi penilaian. Rincian hasil penilaian SAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan terdiri dari :

- Perencanaan Kinerja : 29.75
- Pengukuran Kinerja : 22.81
- Pelaporan Kinerja : 12.09
- Evaluasi Internal : 6.48
- Capaian Kinerja: 14,00

Perencanaan kinerja dilakukan secara berjenjang dimulai dari penentuan sasaran perangkat daerah yang dapat menunjang terwujudnya visi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 kemudian dijabarkan pada perencanaan kinerja eselon III dan eselon IV sebagai penanggung jawab tercapainya output dari kegiatan. Demikian halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang dimulaidari eselon IV sampai eselon II. Tercapainya output yang telah direncanakan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 106.25% dengan predikat sangat berhasil.



Dari data tersebut diatas diketahui pencapaian target indikator predikat SAKIP perangkat daerah capaiannya adalah 106,25% Dari target yang ditetapkan adalah A realisasinya juga A dengan nilai 85.12. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pertanggung jawaban penggunaan anggaran pada Balitbangren telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel walaupun belum optimal.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian Predikat SAKIP perangkat daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2024 terhadap targetTahun 2024



Dari grafik diatas, terlihat bahwa perkembangan hasil penilaian terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Balitbangren yang telah dilakukan oleh Inspektorat selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2023. Nilai akuntabilitas kinerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian kinerja mencapai 106.25% dengan kategori sangat berhasil.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 106,25% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut sudah mencapai target dan tetap harus dipertahankan predikat tersebut.

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra (%) 2024	Capaian % 2024 terhadap target 2024
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A (80)	A (85,12)	106,25	A (80)	106,25

Perbandingan capaian kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator predikat SAKIP perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Pendukung

- ❖ Komitmen Balitbangren dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- ❖ Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke selon terendah
- ❖ Komitemen seluruh personil (ASN) untuk meningkatkan kinerja

Faktor Penghambat

- ❖ Belum optimalnya pemahaman beberapa ASN terkait indikator sasaran kerjanya
- ❖ Belum optimalnya pemahaman pengelolaan data kinerja
- ❖ Adanya regulasi terkait nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan

Solusi

- ❖ Memaksimalkan aplikasi Simkinerja yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan
- ❖ Memberikan pengutan kepada ASN khususnya pejabat eselon yang menandatangani perjanjian kinerja
- ❖ Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi ke setiap bidang terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada tujuan dan sasaran perangkat daerah

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Predikat SAKIP perangkat daerah pada tahun 2024 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 3 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

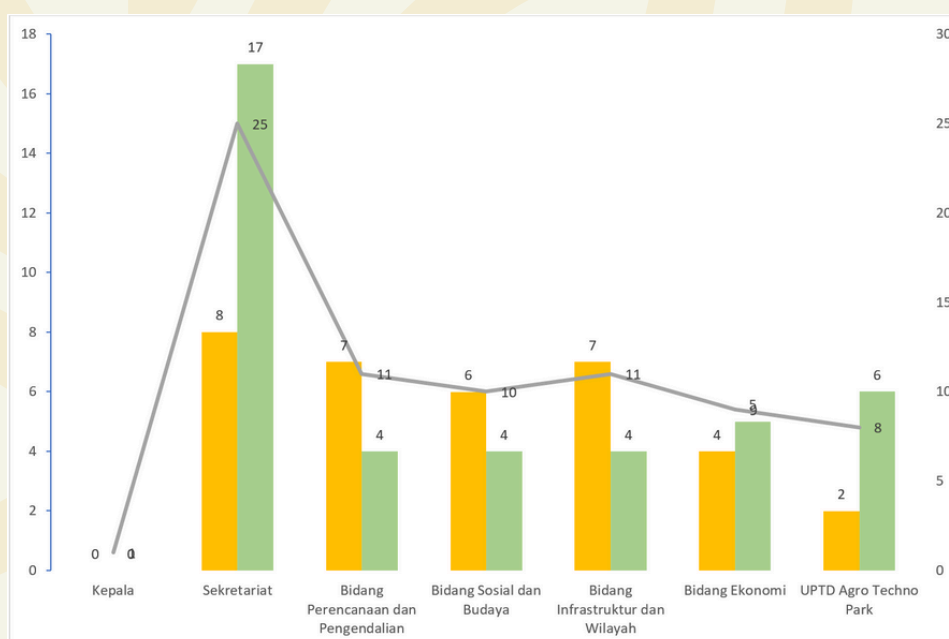
Tabel Program, kegiatan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4)

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standardan tepat waktu	100%	100%	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepatwaktu	100%	100%	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah diperoleh dengan efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah:

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (delapan) pegawai ditambah 17 (tujuh belas) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikAkor Predikat SAKIP perangkat daerah sebesar Rp. 9.430.830,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.853.000,- atau 93,87%

**MENINGKATNYA
KUALITAS TATA
KELOLA
PEMERINTAH
PERANGKAT
DAERAH**

INDIKATOR

3

**Persentase tertib pengelolaan
keuangan dan aset daerah
perangkat daerah**

A.PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pengelolaan keuangan perangkat daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi selama periode satu tahun. Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah menggambarkan sejauh mana proses tahapan pengelolaan keuangan dan aset dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan didukung oleh bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan IKU 2019-2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan aset

1.Tahap perencanaan
Tahapan pertama adalah mengelola keuangan dan aset perangkat daerah yaitu melakukan perencanaan terhadap penggunaan anggaran, dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam perencanaan anggaran dan aset juga membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif daerah melalui proses asistensi.

2.Tahap Pelaksanaan
Pada tahapan ini, perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh rencana yang telah disepakati akan terlaksana dengan baik yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

3. Tahap Pengawasan

Dalam melaksanakan keuangan dan aset perangkat daerah, tentu saja yang dibutuhkan pengawasan dari berbagai macam pihak. Mulai dari pihak inspektorat selaku perangkat daerah yang melakukan pengawasan, pejabat yang berwenang, hingga bahkan masyarakat umum juga berhak melakukan pengawasan pengelolaan keuangan. Pengawasan ini terkait sejauh mana pelaksanaan anggaran dan aset yang telah direncanakan dan dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan apakah sesuai target atau tidak.

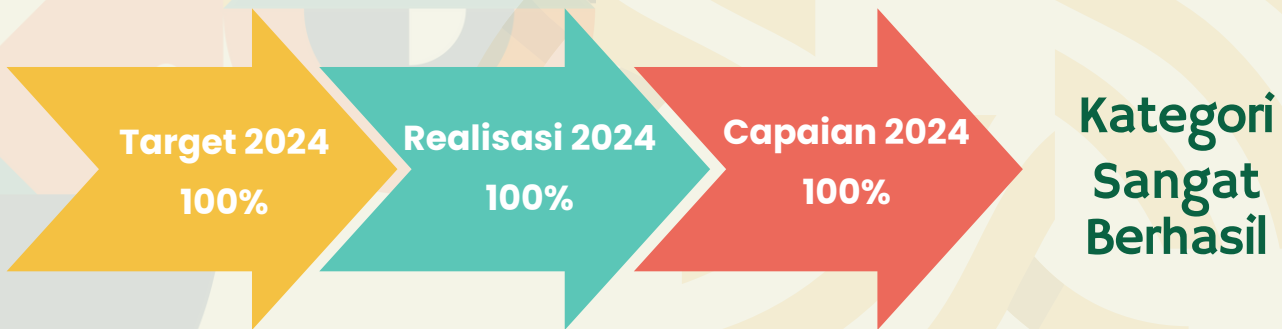
4. Tahap pertanggungjawaban

Terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban dimana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bahwa perangkat daerah dalam mengelola dan melaksanakan keuangan dan aset harus dapat memberikan pertanggung jawaban. Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas apakah penggunaan anggaran dan aset sudah tepat dan sesuai sasaran atau tidak. Pada tahapan pertanggung jawaban ini berupa laporan keuangan akhir tahun yang memuat seluruh pelaksanaan keuangan dan pengelolaan aset selama satu tahun.

Dari keseluruhan tahapan tersebut seluruhnya apakah proses dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau tidak. Sehingga persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase tertib pengelolaan} & \quad \text{Jumlah tahapan} \\ \text{keuangan dan aset perangkat} & \quad \text{pengelolaan keuangan dan aset} \\ \text{daerah} & \quad \text{yang tertib} \\ & = \frac{\quad}{\quad} \times 100 \\ & \quad \text{Jumlah seluruh tahapan} \\ & \quad \text{pengelolaan keuangan dan aset} \\ & = \frac{4}{4} \times 100 \\ & = 100 \% \end{aligned}$$

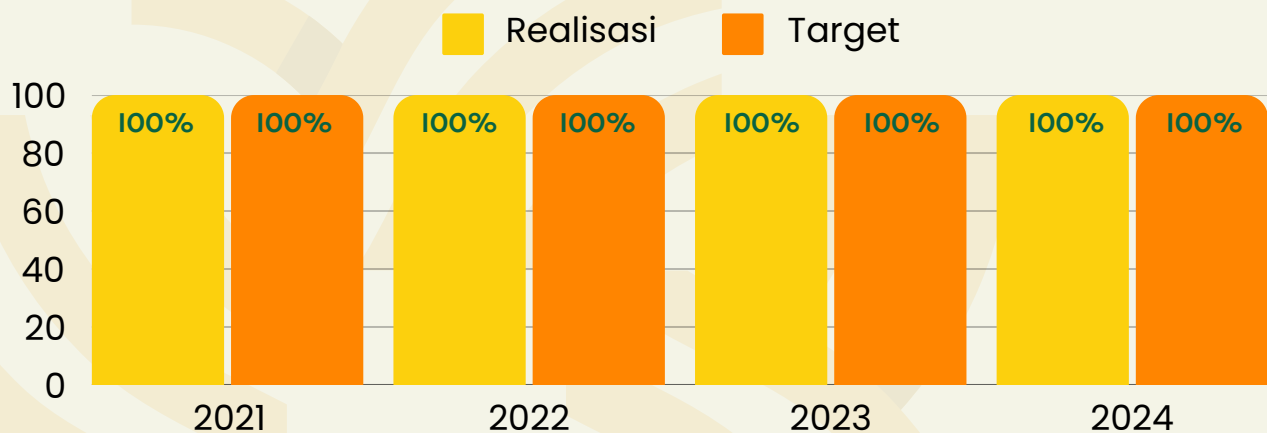
Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.



B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya tetap konsisten.

Perbandingan capaian kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikutini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Renstra (%) 2024	Capaian % 2024 terhadap target 2024
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Pendukung

- ❖ Komitmen Balitbangren dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- ❖ Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke selon terendah
- ❖ Komitemen seluruh personil (ASN) untuk meningkatkan kinerja

Faktor Penghambat

- ❖ Masih kurangnya SDM pejabat pengelola keuangan dalam hal pelaporan sehingga pejabat pengelola keuangan lainnya harus rangkap pekerjaan
- ❖ Masih kurangnya sosialisasi kepada keuangan apabila ada kebijakan dan aplikasi terbaru

Solusi

- ❖ Membrikan sosialisasi dan pembelajaran kepada seluruh pengelola SPJ di bidang-bidang terkait pengelolaan SPJ sehingga dapat meminimalisir temuan administrasi keuangan dari inspektorat
- ❖ Melakukan perbaikan-perbaikan dari hal administrasi baik keuangan maupun pengelolaan aset

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatanyang dilakasanakan untuk mendukung indikator Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada tahun 2024 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 2 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

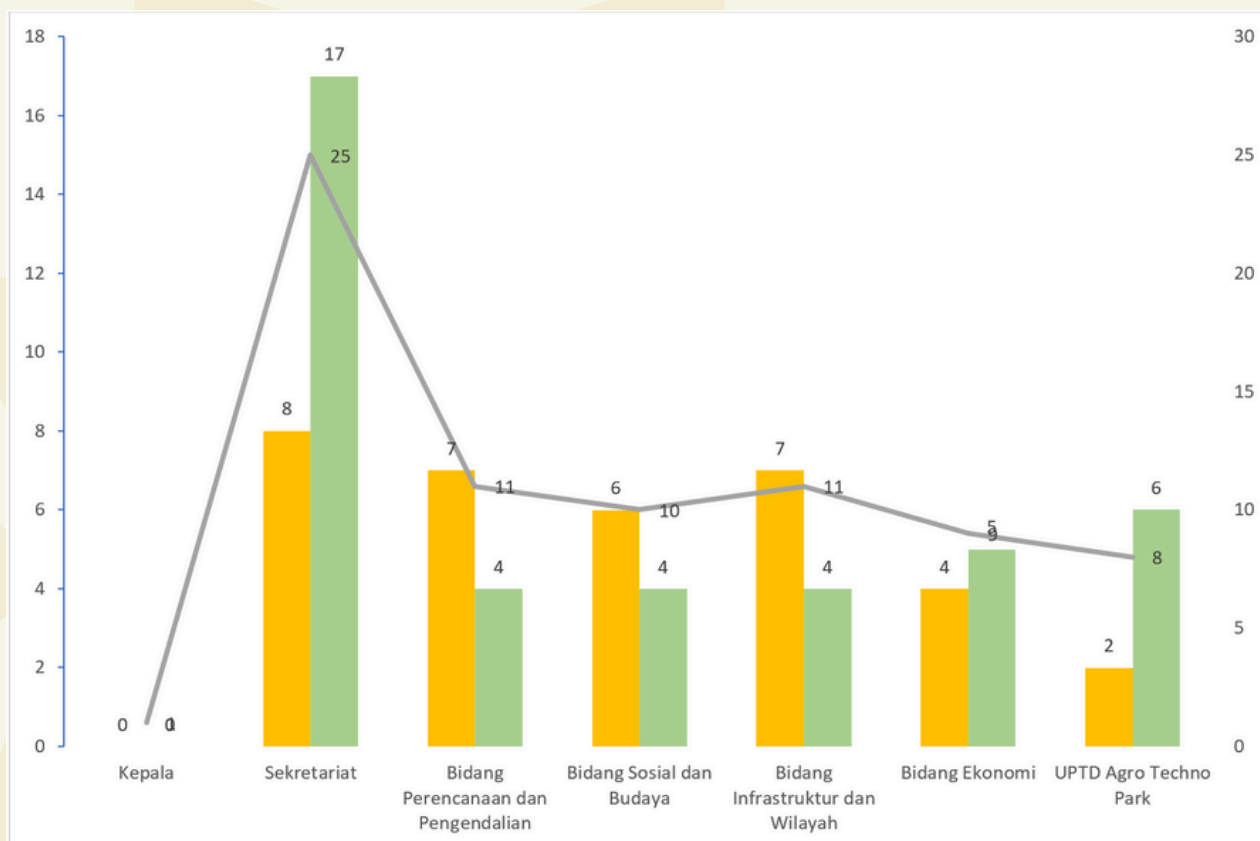
Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5)

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standardan tepat waktu	100%	100%	100
Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gajidan tunjangan ASN	36 Orang	36 Orang	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah diperoleh dengan efisisensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (delapan) pegawai ditambah 17 (tujuh belas) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator Predikat SAKIP perangkat daerah sebesar Rp. 2.541.219.433,20,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.485.373.246 atau 97,8%

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Balitbangren untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, memerlukan dukungan anggaran. Pada tahun 2024, Balitbangren mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.472.427.548,07 yang direalisasikan sebesar Rp. 5.051.586.906,- atau sebesar 92,31% Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
2. Sisa murni beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan
3. Penurunan volume belanja yang disebabkan oleh faktor teknis saat pelaksanaan kegiatan

Jika dibandingkan dengan hasil kinerja yang sudah dicapai dengan pengguna anggaran, maka sudah terjadi efektifitas penggunaan anggaran. Dimana sasaran strategis Balitbangren untuk 18 (delapan belas) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 92,31 % dan diimbangi dengan capaian realisasi anggaran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2024

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	100 %	100%	100%	890.549.655	756.200.012	84,91	-15,09	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu								
Meningkatnya kualitas novasi daerah								
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (30,00)	Inovatif (45,32)	151,06	1.069.999.921	896.123.987	83,74	-16,26	Program Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah								
Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik (88,31)	Baik (87,96)	99,53%	961.227.953	905.036.661	94,15	-5,85	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (85,12)	106,25	9.430.830	8.853.000	93,88	6,12	
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100	100	100	3.549.539.060	2.485.373.246	70,01	29,98	

Dari tabel diatas menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,69% berdasarkan rata-rata realisasi kinerja Balitbangren Tahun 2024 penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 92,31% telah mampu menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 96%. Penjelasan mengenai realisasi anggaran tahun 2024 dapat tersajikan pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program	Alokasi (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.430.830	8.853.000	93,87
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.623.530	5.423.000	96,43
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.978.130	2.683.000	90,09
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	829.170	747.000	90,09
Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	2.541.219.433,20	2.485.373.246	97,80
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.537.643.643,20	2.481.884.246	97,80
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.575.790	3.489.000	97,57
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	335.797.221,10	306.695.555	91,33
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	290.516.700	277.030.065	95,36
1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	11.586.060	10.250.740	88,47
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	5.550.060	5.528.220	99,61
3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7.629.120	7.542.000	98,86
4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	48.466.310	48.321.000	98,70
5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	8.951.460	3.381.000	37,77
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	208.333.690	202.007.105	96,96
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.893.280	3.782.400	97,15
1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.893.280	3.782.400	97,15
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.004.201,10	22.409.090	64,02
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3.621.330	3.059.090	84,47
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	31.382.870	19.350.000	61,66
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6.383.040	3.474.000	54,43
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6.383.040	3.474.000	54,33

Program	Alokasi (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.430.830	8.853.000	93,87
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.623.530	5.423.000	96,43
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.978.130	2.683.000	90,09
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	829.170	747.000	90,09
Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	3.549.539.060	2.485.373.246	97,80
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.545.963.270	2.481.884.246	97,80
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.575.790	3.489.000	97,57
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	335.797.221,10	306.695.555	91,33
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	290.516.700	277.030.065	95,36
1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	11.586.060	10.250.740	88,47
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	5.550.060	5.528.220	99,61
3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7.629.120	7.542.000	98,86
4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	48.466.310	48.321.000	98,70
5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	8.951.460	3.381.000	37,77
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	208.333.690	202.007.105	96,96
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.893.280	3.782.400	97,15
1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.893.280	3.782.400	97,15
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.004.201,10	22.409.090	64,02
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3.621.330	3.059.090	84,47
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	31.382.870	19.350.000	61,66
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6.383.040	3.474.000	54,43
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6.383.040	3.474.000	54,33

Program	Alokasi (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	554.752.434	449.504.457	81,03
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	389.736.841	300.803.490	77,18
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	28.149.371	25.843.200	91,81
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	675.000	0	0
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	300.791.638	225.892.514	75,10
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD	52.395.692	46.659.776	89,05
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.474.880	2.408.000	97,30
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.250.260	0	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	74.253.444	68.230.392	91,89
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD	29.591.042	29.315.292	99,07
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	803.640	724.000	90,09
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2.545.720	852.000	33,47
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD	33.819.462	31.896.100	94,31
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.783.460	2.011.000	72,25
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.710.120	3.432.000	72,66

Program	Alokasi (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90.762.149	80.470.575	88,66
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD, RPJMD dan RKPD	9.695.326	45.728.261	92,02
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.350.156	2.101.600	89,42
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.383.502	3.263.200	96,44
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	28.092.293	22.942.514	81,67
5. +Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.666.022	2.030.000	76,14
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.574.850	4.405.000	96,29
Program Penelitian dan Pengembangan	1.069.999.675,97	896.123.987	83,75
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	260.148.490	197.655.616	100
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	260.148.490	197.655.616	100
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	257.044.520	244.215.815	99,99
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	147.434.240	135.078.350	100
2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	109.610.280	109.137.465	100
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	552.806.911	454.252.556	100
1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	552.806.911	454.252.556	100
Jumlah	5.472.427.548,07	5.051.586.906	92,31



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Badan Penelitian Pengembangan
dan Perencanaan

BAB IV PENUTUP

L A K I P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024

BAB IV

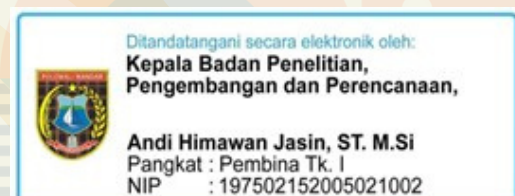
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2024, Capaian kinerja Balitbangren Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Balitbangren sebesar 96 % serta capaian kinerja keuangan sebesar 92,31%, sehingga memperlihatkan adanya efisisensi penggunaan anggaran sebesar 7,69%.

Mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penyusunan LAKIP ini, maka langkah-langkah penting yang harus dilakukan ke depan untuk meningkatkan kinerja Balitbangren diantaranya :

- 1.Meningkatkan pelayanan publik secara maksimal dengan memperhatikan saran dan masukan dari pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan Balitbangren serta meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.
- 2.Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas data evaluasi dan dan pada akhirnya dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik dan berkualitas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Akuntabel dan Modern		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu/ jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan X 100
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah divalidasi oleh Badan Litbang kemendagri melalui proses penjaminan mutu oleh unit UKKPPM
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah indeks kepuasan stakeholder atas survey kepuasan pelayanan publik yang dilakukan perangkat daerah secara berkala dibagi dengan jumlah jenis pelayanan perangkat daerah yang dilakukan survey
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Review Inspektorat atau Implementasi SAKIP pada perangkat daerah
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan aset

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422
<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Himawan Jasin, ST., M.Si.**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Ihm Borahima**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Polewali Mandar,

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,
Kepala Badan Penelitian Pengembangan
dan Perencanaan,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19750215 200502 1 002

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Inovatif (41,64)	Inovatif
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.530.197.843	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 329.633.648	APBD
3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.069.999.921	APBD
4	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 340.926.290	APBD
JUMLAH		Rp 6.270.757.702	APBD

Pihak Kedua,
Pj.Bupati Polewali Mandar,



Drs. Muhammad Ilham Borahima

Pihak Pertama,
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan,



Andi Himawan Jasin, ST.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19750215 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **A. IDRUS, SH**

Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

A. IDRUS, SH

Pangkat : Pembina

NIP : 19700605 200501 1 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	76%	85%
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	76%	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	76%	100%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja baik	100%	100%
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum kantor	100%	100%
5	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	100%
6	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	100%
7	Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	93,76%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 10.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.549.539.060	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 311.086.883	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 125.241.000	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 9.872.340	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 515.027.730	APBD
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp 9.430.830	APBD
Jumlah		Rp 4.530.197.843	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.SI
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



A. IDRUS, SH
Pangkat : Pembina
NIP. 19700605 200501 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422
<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SITTI HADIJAH, SE**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. IDRUS, SH**
Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

A. IDRUS, SH

Pangkat : Pembina
NIP : 19700605 200501 1 026

Pihak Pertama,
ANALIS KEUANGAN DAERAH,

SITTI HADIJAH, SE.

Pangkat : Penata
NIP : 19800504 201409 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya tertib administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100%	100%
1	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket
2	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	3 Paket
3	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 Paket	23 Paket
4	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233 laporan	216 laporan
II	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	100%
5	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 jenis	1 Laporan
6	Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.625 M	1 Laporan
III	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	85%	100%
8	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit
9	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	8 Unit
10	Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	27 Unit
11	Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2625 M	1 unit

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Administrasi umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.036.625	APBD
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 7.957.657	APBD
3	Penyediaan bahan/material	Rp 12.307.569	APBD
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 249.233.200	APBD
II	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 4.500.000	APBD
6	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 510.011.580	APBD

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
#	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 94.394.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 797.000	APBD
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 8.690.000	APBD
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 21.360.000	APBD
JUMLAH		Rp 914.287.631	APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

A IDRUS, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 19750215 200502

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,

SITTI HADIJAH
Pangkat : Penata
NIP : 1980504 201409 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422
<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SITTI ROHANA, SE**
Jabatan : Analis Keuangan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. IDRUS, SH**
Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

A. IDRUS, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 19700605 200501 1 026

Pihak Pertama,
ANALIS KEUANGAN DAERAH,

SITTI ROHANA, SE
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19720609200701 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	76%	85%
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	76%	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	76%	100%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja baik	100%	100%
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum kantor	100%	100%
5	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	100%
6	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	100%
7	Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	93,76%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 10.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.549.539.060	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 311.086.883	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 125.241.000	APBD

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	9.872.340	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	515.027.730	APBD
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp	9.430.830	APBD
Jumlah		Rp	4.530.197.843	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



A. IDRUS, SH

Pangkat : Pembina
NIP. 19700605 200501 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GUNAWANG, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN PROGRAM,

GUNAWANG, SP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19801224 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	100%	100%
		Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD	100%	100%
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah	97,96%	95%
I	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	3 dokumen
1	Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-	2 dokumen
2	Tersedianya berita acara Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 laporan	1 berita acara
3	Tersedianya berita acara hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1 laporan	26 berita acara
4	Tersedianya berita acara Musrenbang Kabupaten	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 laporan	1 Berita Acara
5	Tersedianya usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	1 laporan	404 usulan
6	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RP-JMD/RKPD)	2 dokumen	3 Dokumen
II	Meningkatnya kualitas analisis dan pembinaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1 laporan	1 laporan
7	Terlaksananya pembinaan dalam pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Laporan	45 laporan
III	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	1 laporan	6 laporan


8	Tersedianya laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (evaluasi RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	2 laporan
9	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan
IV	<i>Meningkatnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>
10	Tersedianya data dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	1 Laporan	1 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 340.926.290	
I	Penyusunan, perencanaan dan pendanaan	Rp 295.645.770	APBD
1	Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Rp 15.410.130	APBD
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 5.550.060	APBD
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp 7.629.120	APBD
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 48.466.310	APBD
5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 8.951.460	APBD
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 209.638.690	APBD
II	Analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Rp 3.893.280	APBD
7	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Rp 3.893.280	APBD
III	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Rp 35.004.200	APBD
8	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	Rp 3.621.330	APBD
9	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Rp 31.382.870	APBD

IV	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp	6.383.040	APBD
10	Pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp	6.383.040	APBD
Jumlah		Rp	340.926.290	

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19750215 200502 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PROGRAM,



GUNAWANG, SP., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19801224 200502 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JAMALUDDIN, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si.**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH,

JAMALUDDIN, S.Sos.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19780410 200701 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase keselarasan kegiatan antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase konsistensi sub kegiatan antara RENJA dengan RKA pada Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral	99,29%	95%
1	Meningkatnya kualitas sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase kesesuaian Renstra/Rer,ja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100%	100%
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan
2	Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan
3	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan
4	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan
5	Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan
6	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan

2	Meningkatnya kualitas pengkajian dan kelitbangan	Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan	90%	100%
1	Meningkatnya penelitian dan pengembangan Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%	100%
1	Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	1 dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Rp 107.180.148	APBD
1	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Rp 2.634.276	APBD
2	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	Rp 2.686.446	APBD
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 57.025.326	APBD
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 34.833.268	APBD
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Rp 7.853.502	APBD
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	Rp 7.468.052	APBD

2	Penelitian dan Pengembangan Daerah		
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 109.610.000	APBD
1	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 109.610.000	APBD
Jumlah		Rp 216.790.148	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19750215 200502 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH,



JAMALUDDIN, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19780410 200701 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSDI, S.Sos., M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial Dan Budaya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA,

RUSDI, S.Sos., M.Adm.KP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19731231 200212 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan program OPD pada bidang sosial budaya antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase keselarasan kegiatan OPD pada bidang sosial budaya antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase konsistensi sub kegiatan OPD pada bidang sosial budaya antara RENJA dengan RKA pada Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada bidang sosial budaya	99,29%	95%
1	Meningkatnya kualitas sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Persentase kesesuaian Renstra/Rerja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang sosial budaya	100%	100%
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan
2	Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan
3	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan
4	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan
5	Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia	1 Laporan	1 Laporan
6	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia	4 Laporan	4 Laporan

2	Meningkatnya kualitas pengkajian dan kelitbangan	Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan	90%	100%
i	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan	100%	100%
1	Tersedianya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	1 Laporan
ii	Meningkatnya penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%
1	Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	1 dokumen
2	Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	-	1 dokumen
3	Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	1 dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
i	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 115.998.934	APBD
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 29.577.222	APBD
2	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Rp 3.223.470	APBD
3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Rp 5.340.260	APBD
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 70.074.012	APBD
5	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Rp 2.533.710	APBD

6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Rp	5.250.260	APBD
#	Penelitian dan Pengembangan Daerah			
I	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	552.806.911	APBD
1	Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	552.806.911	APBD
#	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan	Rp	260.148.490	APBD
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Rp	260.148.490	APBD
Jumlah		Rp	928.954.335	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA,



RUSDI, S.Sos., M.Adm.KP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19731231 200212 1 030



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AKHMAD FARID, S.Pt**

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BALITBANGREN,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG EKONOMI,

AKHMAD FARID, S.Pt

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19820727 200502 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG EKONOMI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	<i>Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah</i>	100%	100%
		<i>Persentase keselarasan kegiatan antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah</i>	100%	100%
		<i>Persentase konsistensi sub kegiatan antara RENJA dengan RKA pada Perangkat Daerah</i>	100%	100%
		<i>Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral</i>	99,29%	95%
1	<i>Meningkatnya kualitas sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Ekonomi</i>	<i>Persentase kesesuaian Renstra/Rerja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang ekonomi</i>	100%	100%
1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan
2	Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	4 Laporan	4 Laporan
3	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	1 Laporan	1 Laporan
4	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan
5	Tersedianya laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan
6	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>		
1	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 84.146.662	APBD
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 48.546.442	APBD
2	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	Rp 2.783.460	APBD
3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Rp 4.395.720	APBD
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.000.800	APBD
5	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Rp 4.710.120	APBD
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Rp 4.710.120	APBD
Jumlah		Rp 84.146.662	

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN,



ANDI HIMAWAN JASNI, ST., M.Si

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG EKONOMI,



AKHMAD FARID, S.Pt



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon: 0428-21120 Faks: 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : bappedalitbang@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nur Anidah, SP**
Jabatan : Kepala UPTD Agro Techno Park

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penelitian
Pengembangan dan Perencanaan,

ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19750215 200502 1 002

Pihak Pertama,
Kepala UPTD Agro Techno Park,

Nur Anidah, SP
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19771123 200801 1 017

Supporting
Indikator Nilai AKIP

IK

**Meningkatnya Kinerja Perencanaan
Pembangunan Daerah**

Sasaran 1

Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai Standar dan Tepat Waktu

**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

IK

Persentase Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPD Perangkat Daerah

**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah**

IK

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan

Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD

IK

Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)

Tersedianya Berita acara Konsultasi Publik

IK

Jumlah berita acara konsultasi publik

Tersedianya berita acara hasil Forum SKPD/Lintas SKPD

IK

Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah

Tersedianya berita acara Musrenbang Kabupaten

IK

Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten

Tersedianya usulan yang terverifikasi oleh kecamatan

IK

Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan

Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sesuai standar dan tepat waktu

IK

Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan

**Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

IK

Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan

Tersedianya laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (evaluasi RPJMD, RKPD)

IK

Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah

IK

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

**Meningkatnya kualitas analisis dan pembinaan data dan
informasi perencanaan pembangunan**

IK

Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya pembinaan dalam pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

IK

Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

**Meningkatnya Kualitas dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah**

IK

Persentase Keselarasan program antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

**Meningkatnya Kualitas sinergitas dan harmonisasi
perencanaan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan,
Perekonomian, Sumber Daya Alam(SDA),
Pemerintahan, Pembangunan Manusia**

IK

Persentase Keselarasan program antara RPJMD dengan Renstra OPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam(SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya

IK

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, PJMD dan RKPD)

Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam(SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya

IK

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Bidang Infrastruktur, Kewilayahan Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, PJMD dan RKPD)

Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam(SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya

IK

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Bidang Infrastruktur, Kewilayahan Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, PJMD dan RKPD)

**Meningkatnya implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**

IK

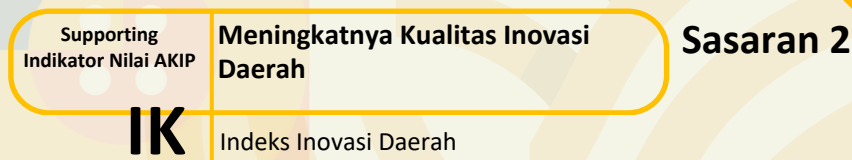
Jumlah laporan hasil implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Tersedianya data dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)

IK

Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola

LAMPIRAN



Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

IK Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kebudayaan yang di manfaatkan

Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan BidangAspek-Aspek Sosial

IK Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan pengembangan

IK Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

IK Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

IK Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

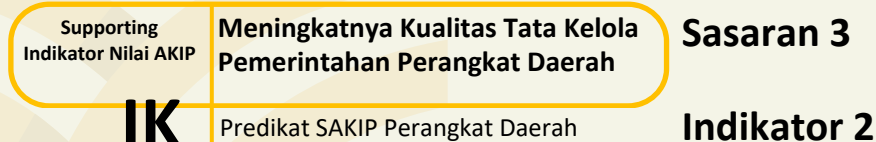
IK Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Meningkatnya kualitas kajian dankelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang bernilai inovasi

IK Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan

Tersedianya hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan

IK Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian,perkebunan dan pangan



Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu

IK Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu

Meningkatnya kualitasPerencanaan Perangkat Daerah

IK Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitasRencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

IK Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Meningkatnya kualitasLaporan kinerja perangkat Daerah

IK Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Supporting
Indikator Nilai AKIP

IK

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indeks Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sasaran 3

Indikator 1

Meningkatnya tertib Administrasi umum Perangkat Daerah

IK

Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor

Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi/listrik penerangan

IK

Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan

Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan koran

IK

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Terpenuhiya Kebutuhan makan minum

IK

Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan

Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor

IK

Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Terpenuhiya kebutuhan cetak dan penggandaan

IK

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Terpenuhiya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah

IK

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

IK

Jumlah laporan pengelolaan Informasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor

IK

Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur

Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

IK

Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja baik

Meningkatnya kualitas pengelolaan Surat Menyurat

IK

Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

IK

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhiya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

IK

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

IK

Persentase saran dan prasarana kantor kondisi baik

Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor

IK

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas jabatan

IK

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara

Supporting
Indikator Nilai AKIP

IK

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Persentase tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Sasaran 3

Indikator 3

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

IK

Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

IK

Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN

Meningkatnya kualitas penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

IK

Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah

IK

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Tujuan Renstra

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	58,02	63,18	64,37	65,56	66,75	67,95

Sasaran 1
Renstra

Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran

Indikator : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai Standar dan Tepat Waktu

2018	2019	2020	2021	2022	2023
100	100	100	100	100	100

Sasaran
Strategis

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

Persentase Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPD Perangkat Daerah

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan program antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam(SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia
<p>Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah</p> <p>1 Laporan</p> <p>Pelaksanaan Konsultasi Publik</p> <p>1 Laporan</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan ForumSKPD/Lintas SKPD</p> <p>1 Laporan</p> <p>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>1 Laporan</p> <p>Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan</p> <p>1 Laporan</p> <p>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Laporan</p>	<p>Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD</p> <p>1 Laporan</p>	<p>Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota</p> <p>1 Laporan</p> <p>Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</p> <p>1 Laporan</p>	<p>Pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</p> <p>1 Laporan</p>	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>6 Laporan</p> <p>Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, Sumber Daya Alam(SDA), Pemerintahan, Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>6 Laporan</p> <p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian</p> <p>6 Laporan</p>

Tujuan Renstra

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	58,02	63,18	64,37	65,56	66,75	67,95

Sasaran 2
Renstra

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator Sasaran

Indikator : Indeks Inovasi Daerah

2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	35,91	43,26	41,64	45,32

Sasaran
Strategis

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kedudukan yang di manfaatkan

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan pengembangan

Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan

Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Meningkatnya kualitas kajian dan kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang bernilai inovasi

Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan

Program

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kegiatan

Sub Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

1 Laporan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi danPembangunan

Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD

1 Laporan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi danPembangunan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

1 Laporan

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi

1 Laporan

Tujuan Renstra

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	58,02	63,18	64,37	65,56	66,75	67,95

Sasaran 3 Renstra Indikator Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indeks Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah				Predikat SAKIP Perangkat Daerah				Presentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2024	2021	2022	2023	2024
87,42	86,33	88,84	86,33	82,36	83,64	83,59	85,12	100	100	100	100

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran

Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu

Program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Sub Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Paket
Penyediaan Bahan/Material	24 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378 Laporan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1060 Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	1 Laporan
---	-----------

Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Paket
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Sub Kegiatan

LAMPIRAN

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 5.472.427.548,07,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.051.586.906,- anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan sebagai berikut :

Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program	Alokasi (RP)	Realisasi (RP)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	3.511.878.216	3.399.262.907
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.086.883	309.055.083
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.036.625	5.036.625
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.575.032	35.575.032
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.957.657	7.957.657
4. Penyediaan Bahan/Material	12.307.569	12.307.569
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.233.200	247.298.200
6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	976.800	880.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.027.730	462.291.183
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	516.150	0
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	508.783
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.011.580	461.782.400
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.241.000	124.390.395
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.394.000	93.607.995
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	797.000	732.400
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.690.000	8.690.000
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.360.000	21.360.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.872.340	9.300.000
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.872.340	9.300.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.430.830	8.853.000
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.623.530	5.423.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.978.130	2.683.000
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	829.170	747.000
Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	2.541.219.433,20	2.485.373.246
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.537.643.643,2	2.481.884.246
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.575.790	3.489.000

Program	Alokasi (RP)	Realisasi (RP)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	335.797.221	306.695.555
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	290.516.700	277.030.555
1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	11.586.060	10.250.740
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	5.550.060	5.528.220
3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7.629.120	7542.000
4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	48.466.310	48.321.000
5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	8.951.460	3.381.000
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	208.333.690	202.007.105
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.893.280	3.782.400
1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.893.280	3.782.400
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.004.200	22.409.090
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3.621.330	3.059.090
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	31.382.870	19.350.000
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6.383.040	3.474.000
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6.383.040	3.474.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	554.752.434	449.504.457
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	389.736.841	300.803.490
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	28.149.371	25.843.200
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	675.000	0
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	300.791.638	225.892.514
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD	52.395.692	46.659.776
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.474.880	2.408.000
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.250.260	0

LAMPIRAN

Program	Alokasi (RP)	Realisasi (RP)
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	74.253.444	68.230.392
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD	29.591.042	29.315.292
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	803.640	724.000
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2.545.720	852.000
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD	33.819.462	31.896.100
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.783.460	2.011.000
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.710.120	3.432.000
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90.762.149	80.470.575
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD, RPJMD dan RKPD	9.695.326	45.728.261
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.350.156	2.101.600
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.383.502	3.263.200
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	28.092.293	22.942.514
5. +Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.666.022	2.030.000
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.574.850	4.405.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.069.999.675,97	896.123.987
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	260.148.490	197.655.616
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	260.148.490	197.655.616
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	257.044.274	244.215.815
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	147.434.240	135.078.350
2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	109.610.280	109.137.465
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	552.806.911	454.252.556
1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	552.806.911	454.252.556
TOTAL	5.472.427.548,07	5.051.586.906

Monitoring dan Evaluasi Renja Tahun 2024

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

No	Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) Yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi				Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
				I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6	7	8							9=(5+6+7+8)	10=9/4 x 100				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%Rp			
	Program Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	3.511.878.549	0%	786.399.552	1.048.911.914							3.399.262.907	95	96,79			
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%		0%										95	96,79			
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	85%		0%										95	96,79			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu		9.430.830			1.270.000		0	6.836.000	0	8.853.000		100,00	93,87				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.623.530	0 Dokumen		0		1	4.153.000	2 Dokumen	5.423.000		100,00	96,43				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA, SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2.978.130	0 Dokumen		1.270.000		1	2.683.000	2 Dokumen	2.683.000		100,00	90,09				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	829.170	1 Laporan						1 Laporan	747.000		100,00	90,09				
	Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	100	2.541.219.766	0	534.173.084	894.617.785		526.467.963	0	530.114.414	2.85.373.246		100,00	97,80				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang	2.537.643.976,20	36 Orang	534.173.084	894.617.785		526.467.963		526.467.963	2.481.884.246		100,00	97,80				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	3.575.790							3.489.000	2 Laporan	3.489.000	100,00	97,57				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100%	311.086.883	0	39.174.068	96.906.129	15,60	48.517.410	40,01	129.459.476	75	309.055.083	100,00	99,35				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	5.036.625			5.036.625				5 Paket	5.036.625	100,00	100					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
							I	II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7	8							9=(5+6+7+8)		10=9/4 x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%Rp	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	35.575.032	0 paket	-	6 paket	20.125.032	0,00	-	43,43	15.450.000	12 paket	35.575.032	10000	100,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	7.957.657	0 paket	-	2 Paket	5.590.027	0,00	-	29,75	2.367.630	3 paket	7.957.657	100,00	100,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23 paket	12.307.569	0 paket	-	100,00	12.307.569	0,00	-	0,00	-	23 paket	12.307.569	100,00	100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 laporan	249.233.200	0 laporan	39.174.068	21,60	53.844.876	19,47	48.517.410	42,43	105.761.846	216 laporan	247.298.200	100,00	99,22	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	976.800	0 dokumen	-	0,00	-	0,00	-	90,09	880.000	1 dokumen	880.000	100,00	90,09	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMID	100,00%	9.872.340	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9.300.000	0,00	9.300.000	100,00	94,20	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.872.340	0 unit	-	0,00	-	0,00	-	94,20	9.300.000	2 Unit	9.300.000	100,00	94,20	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100,00%	515.027.730	33,33	213.052.400	66,67	41.800.000	0,00	-	40,28	207.438.783	66,67	462.291.183	67,00	89,76	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	2 laporan	516.150	310 surat	-	210 surat	-	0,00	-	0,00	-	2 laporan	-	0	0,00	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	4.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	11,31	508.783	1 laporan	508.783	100,00	11,31	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	510.011.580	0,00	213.052.400	0 laporan	41.800.000	0,00	-	40,57	206.930.000	1 laporan	461.782.400	100,00	90,54	

No	Program/Kegiatan/Su- bkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		
				I				II								III
1	2	3	4	5	6	7	8					9=(5+6+7+8)	10=9/4 x 100			
			K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%Rp			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	80,00%	0,00	-	0,00	14.400,000	0,00	-	87,82	109.990.395	0,00	124.390.395	100,00	99,32	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	0 unit	-	1 unit	14.400,000	0,00	-	83,91	79.207.995	2 unit	93.607.995	100,00	99,17	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	8 unit	0 unit	-	0 unit	-	0,00	-	91,89	732.400	8 unit	732.400	100,00	91,89	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	0 unit	-	0 unit	-	0,00	-	100,00	8.690.000	24 unit	8.690.000	100,00	100,00	
	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0,00	-	100,00	21.360.000	1 Gedung	21.360.000	100,00	100,00	
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keseluruhan program antara RPJMD dengan RKPD	100%	0,00	0,00	0,00	14,15	67,60	226.993.055	0,00	306.695.555	100,00	91,33			
		Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD	100%	335.797.221	0,00	-	0,00	32.197,600	0,00	47.504.900	0,00	226.993.055	0,00	306.695.555	100,00	91,33
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah	95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	0,00	-	0,00	29.423.200	0,00	33.958.500	0,00	213.648.365	0,00	277.030.065	100,00	95,36	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 dokumen	11.586.060	1 dokumen	0,00	-	0,00	-	88,47	10.250.740	3 dokumen	10.250.740	100,00	88,47	

No	Program/Kegiatan/Su- bi-kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	
			4	5	6	7	8	III		IV		9=(5+6+7+8)		10=9/4 x 100		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%Rp	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	5.550.060	1 Berita Acara	-	0,00	-	0,00	99,61	5.528.220	1 Berita Acara	5.528.220	100,00	99,61	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas PD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	26 Berita Acara	7.629.120	0 berita acara	-	26 Berita Acara	88,48	6.750.000	10,38	792.000	26 Berita Acara	7.542.000	100,00	98,86	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	48.466.310	0 berita acara	-	1 Berita Acara	48,80	23.650.000	42,65	20.671.000	1 Berita Acara	48.321.000	100,00	99,70	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	515 usulan	8.951.460	515 usulan	-	0,00	2.195.000	0,00	13,25	1.186.000	515 usulan	3.381.000	100,00	37,77	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP/PP/RP/MD/RKPD)	3 dokumen	208.333.690	0 dokumen	-	1 dokumen	23.228.200	1,71	3.558.500	84,11	175.220.405	3 dokumen	202.007.105	100,00	96,96
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1 laporan	3.893.280	0 laporan	-	0 laporan	2.774.400	0,00	25,89	1.008.000	0 laporan	3.782.400	100,00	97,15	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan PD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	45 Orang	3.893.280	0 Orang	-	45 Orang	2.774.400	0,00	25,89	1.008.000	45 Orang	3.782.400	100,00	97,15	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	5 laporan	35.004.201	1 laporan	-	1 laporan	-	38,70	13.546.400	25,32	8.862.690	1 laporan	22.409.090	100,00	64,02
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	3.621.330	1 dokumen	-	1 Dokumen	-	63,41	2.296.400	21,06	762.690	1 laporan	3.059.090	100,00	84,47

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	
				I				II				III				IV			
1	2	3	4	5	6	7	8									K	Rp	K	%Rp
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	31.382.871	1 laporan	-	1 laporan	-	35,85	11.250.000	25,81	8.100.000	4 laporan	19.350.000	100,00	61,66			
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 laporan	6.383.040	1 laporan	-	1 laporan	-	0,00	-	54,43	3.474.000	1 laporan	3.474.000	100,00	54,43			
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikeola	1 dokumen	6.383.040	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0,00	-	54,43	3.474.000	1 dokumen	3.474.000	100,00	54,43			
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya yang ditetapkan sesuai standar	20%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89		81,03				
		Persentase keseluruhan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang ekonomi, bidang sosial budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA dan - RKPD dengan RENUA	100%	554.752.435	-	0,00	95.364.801	0,00	0,00	0,00	0,00	281.487.764	89	449.504.457	81,03	81,03			
		Persentase Konsistensi kegiatan OPD antara RENUA dengan RKA pada bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya	100%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89		81,03				
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang ekonomi dan bidang sosial budaya	95%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89		81,03				

No	Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulan												Realisasi kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
				I				II				III					
1	2	3	4	5	6	7	8							9=(5+6+7+8)	10=9/4 x 100		
			K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	%Rp
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	389.736.841	0,00	-	0,00	35.841.876	4,75	18.495.400	63,24	246.466.214	0,00	300.803.490	67	77,18	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD da RKPD)	4 dokumen	28.149.371	0 dokumen	-	2 dokumen	16.283.000	15,79	4.445.200	18,17	5.115.000	4 dokumen	25.843.200	100,00	91,81	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	675.000	0 laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1 laporan	-	0	0	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 laporan	300.791.638	1 laporan	-	1 laporan	-	4,67	14.050.200	70,43	211.842.314	4 laporan	225.892.514	100,00	75,10	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir- Penyusunannya (RPJPD, RPJMD da RKPD)	1 dokumen	52.395.692	0 dokumen	-	0 dokumen	19.558.876	0,00	-	51,72	27.100.900	1 dokumen	46.659.776	100,00	89,05	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pembangunan manusia	1 laporan	2.474.880	0 laporan	-	1 laporan	-	0,00	-	97,30	2.408.000	1 laporan	2.408.000	100,00	97,30	

LAMPIRAN

No	Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulian								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		
1	2	3	4		5	I	6	II		8	III		IV		9=(5+6+7+8)	10=9/4 x 100	
			K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%Rp
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	5.250,260	1 laporan		1 laporan	-	0,00	0,00	-	0,00	-	4 laporan	-	0,00	0,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat bidang perekonomian dan SDA	100%	74.253.444	0,00	-	0,00	28.982.100	0,00	0,00	-	0,00	-	0%	68.230.392	100,00	91,89
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	29.591.042	0 dokumen	-	1 dokumen	8.832.100	53,83	15.928.192	15,39	4.555.000	1 dokumen	29.315.292	100,00	99,07	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	803.640	0 laporan	-	1 laporan	-	0,00	0,00	0,00	1 laporan	724.000	100,00	90,09		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusna Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 laporan	2.545.720	1 laporan	-	1 laporan	-	0,00	0,00	-	4 laporan	852.000	100,00	33,47		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	33.819.462	0 dokumen	-	1 dokumen	20.150.000	10,20	3.448.000	24,54	8.298.100	1 dokumen	31.896.100	100,00	94,31	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	
					I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8					9=(5+6+7+8)		10=9/4 x 100		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%Rp		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang SDA	1 laporan	2.783.460	0 laporan	-	1 laporan	-	0,00	-	0,00	-	1 laporan	2.011.000	100,00	72,25
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 laporan	4.710.120	1 laporan	-	1 laporan	-	0,00	-	0,00	-	4 laporan	3.432.000	100,00	72,86
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	90.762.150	0,00	-	0,00	30.540.825	0,00	14.908.200	0,00	35.021.550	100,00	80.470.575	100,00	88,66
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD dan RKPD)	1 dokumen	49.695.326	0 dokumen	1 dokumen	17.307.001	0,00	12.806.600	0,00	15.614.660	1 dokumen	45.728.261	100,00	92,02	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	2.350.156,80	0 laporan	-	1 laporan	-	0,00	2.101.600	0,00	-	1 laporan	2.101.600	100,00	89,42
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 laporan	3.383.502	1 laporan	-	1 laporan	-	0,00	-	0,00	3.263.200	4 laporan	3.263.200	100,00	96,44
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD dan RKPD)	1 dokumen	28.092.293	0 dokumen	1 dokumen	13.233.824	0,00	-	0,00	9.708.690	1 dokumen	22.942.514	100,00	81,67	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		
				I				II		III						IV
1	2	3	4	5	6	7	8					9=(5+6+7+8)		10=9/4 x 100	%Rp	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	2.666.022	0 laporan	-	1 laporan	-	0,00	-	0,00	2.030.000	1 laporan	2.030.000	100,00	76,14
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 laporan	4.574.850	1 laporan	-	1 laporan	-	0,00	-	0,00	4.405.000	4 laporan	4.405.000	100,00	96,29
4	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbang	80%	1.069.999.343	0,00	-	1,11	11.858.600	31,00	331.698.560	51,64	552.566.827	100,00	896.123.987	100,00	83,75
	Pengelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100%	260.148.198	0,00	-	0,00	6.301.600	0,00	18.036.080	66,62	173.317.936	100,00	197.655.616	100,00	75,98
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Sosial	1 dokumen	260.148.198	0 dokumen	-	0 dokumen	6.301.600	4,51	18.036.080	87,83	173.317.936	1 dokumen	197.655.616	100,00	75,98
	Pengelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%	257.044.275	0,00	-	0,00	-	0,00	-	76,97	197.846.985	100,00	244.215.815	100,00	95,01
	Pengelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	147.434.240	0 dokumen	-	0 dokumen	-	12,78	18.837.700	78,84	116.240.650	1 dokumen	135.078.350	100,00	91,62
	Pengelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah laporan hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	109.610.035	0 dokumen	-	0,00	-	25,12	27.531.130	74,45	81.606.335	1 dokumen	109.137.465	100,00	99,57
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	100%	552.806.870	0,00	-	0,00	5.557.000	0,00	-	32,81	181.401.906	100,00	454.252.556	100,00	82,17
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbang	1 laporan	552.806.870	0 laporan	0 laporan	5.557.000	0,00	267.293.650	32,81	181.401.906	1 laporan	454.252.556	100,00	82,17	
JUMLAH				5.472.427.548		786.399.552		1.188.412.915		1.006.968.625		2.069.805.814		5.051.586.906	96	92,31

Laporan Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jalan Pameran Link. Batu-Batu Kelurahan Darma Kecamatan Polewali
Kabupaten Polewali Mandar, Kode Pos 91314
Email: Inspektorat@polmankab.go.id Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

Polewali, 11 Juni 2024

Nomor : 047.7/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD
Tahun 2023

Kepada

Yth. **Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
Kabupaten Polewali Mandar**

di –
Polewali

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan:
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
 - b. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem AKIP;
 - c. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, memperoleh nilai **85,12** atau memperoleh predikat rating **"A"** (Memuaskan). Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2023		2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	29,75	30	29,70
b.	Pengukuran Kinerja	25	22,81	25	22,81
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,09	15	11,78
d.	Evaluasi Internal	10	6,48	10	6,85
e.	Capaian Kinerja	20	14,00	20	12,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,12	100	83,64
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A		A

4. Nilai sebagai mana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perencanaan Kinerja telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III dan IV). Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019-2024) dengan memuat sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Namun untuk menghasilkan perencanaan strategis yang lebih baik lagi perlu dilakukan monitoring target jangka menengah setiap tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

- 2) Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV. Selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi manajemen kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

c. Pelaporan Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan hasil evaluasi dan analisis terkait capaian-capaian kinerja outcome atau output, melainkan hanya proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA)
- 2) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga tidak dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja
- 3) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya hanya sebatas informasi tentang upaya efisiensi yang telah dilakukan.
- 4) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- 5) Pemanfaatan informasi kinerja juga belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.

d. Evaluasi Internal

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan. Namun evaluasi yang dilaksanakan sebatas hanya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam periodic semesteran adapun hasil evaluasi yang telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan belum ada kesepakatan untuk menindaklanjuti.

e. Capaian Kinerja

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar telah mencapai target output dan outcome yang baik dan dapat mempertahankan capaian tahun sebelumnya, dengan sumber data yang sudah mendekati kriteria yang ditetapkan. Dari output dan outcome yang dilaporkan menunjukkan bahwa Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan telah mencapai hasil yang cukup memadai walaupun belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi capaian-capaian indikator outcome yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas serta dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP, maka kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar direkomendasikan agar melakukan upaya perbaikan untuk setiap komponen, sub-komponen AKIP pada Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :



- a. Lakukan monitoring secara berkala dan menindaklanjutinya terhadap pencapaian atas Target jangka menengah dalam Renstra setiap tahun berjalan
- b. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih baik.
- c. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan.
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- e. Memperkuat komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik

berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

- f. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- h. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Pimpinan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


INSPEKTUR KABUPATEN,

H.AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 20000 1 084

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BALITBANGREN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN



bappedalitbang@polmankab.go.id



Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Mandar